



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun Anggaran 2022

Jalan Brigjend H. Hasan Basryi No. 037 Telepon/Fax 0517-3122

Rantau – Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Setwan melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKJIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022. Akhirnya semoga LKJIP Tahun Anggaran 2022 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD.

Rantau, Februari 2023

SEKRETARIS DPRD,



ILNOOR IFANSYAH, SKM, MS

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	17
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi	17
D. Tindak Lanjut Terhadap LHE Tahun 2020	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	20
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama	22
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	138
BAB IV PENUTUP	131
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022 dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin melaksanakan 2 program dengan 14 kegiatan dan 44 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.367.015.998,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 36.748.823.500,- atau 65,20 %. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala waktu pelaksanaan, juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektivitas pencapaian sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan **Sangat Baik**, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun realisasi 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang didukung program dan kegiatan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2022 diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan khususnya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan dalam menilai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2022.

Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini ada kekurangan yang selalu kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh *stakeholders* dan komponen yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Rincian capaian sasaran strategis dengan masing-masing indikator tiap sasaran dan target serta realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS,TARGET DAN REALISASI SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Realisasi	Capaian	Program dan Kegiatan
Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	91,2	114%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD,Fasilitasi Tugas DPRD
	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah,Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Layanan Keuangan dan

					Kesejahteraan DPRD, Fasilitas Tugas DPRD
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100%	Fasilitasi Tugas DPRD
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	75%	93,8%	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%	111%	Pembahasan Kebijakan Anggaran, Peningkatan Kapasitas DPRD
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	90%	138%	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%	100%	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

BAB

I

PENDAHULUAN

Terwujudnya *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dalam jangka menengah (5 tahunan), Rencana Kerja (RENJA) tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Sumber daya manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak

menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja.

Kondisi internal dan eksternal Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sangat mendukung, sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan baik.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DPRD. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan terakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39). Berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menjalankan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD dan;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Persidangan;
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sbb:

a. Sekretaris DPRD

- 1) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- 2) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan;
- 3) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian hukum dan persidangan;
- 4) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- 5) Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan dukungan penyelenggaraan bidang implementasi legalisasi;
- 7) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- 8) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bagian umum dan keuangan, hukum dan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan;

- 9) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a) Bagian Umum dan Keuangan;
 - b) Bagian Hukum dan Persidangan;
 - c) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bagian Umum Dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan serta program dan keuangan Sekretariat DPRD.

Uraian tugas Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis umum dan keuangan;
- 2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tata usaha;
- 3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian dan administrasi keanggotaan DPRD;
- 4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlengkapan;
- 5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program;
- 6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan anggaran;
- 7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penatausahaan keuangan;
- 8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD dan menyediakan fasilitas Fraksi DPRD;

- 9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- 10) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 11) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- 12) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta verifikasi pertanggung jawaban keuangan Sekretariat DPRD, kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain seluru bidang tugas dan kewenangannya.

c. Bagian Hukum Dan Persidangan

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kajian perundang-undangan dan hubungan masyarakat serta persidangan dan risalah.

Uraian tugas Bagian Hukum dan Persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis hukum dan persidangan;
- 2) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kajian perundang- undangan;
- 3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- 4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
- 5) Menyusun program, memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang- undangan;
- 6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengumpulkan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
- 7) Menyusun program, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;

- 8) Menyusun program, memverifikasi, mengoordinasikan, menyusun, dan mengevaluasi risalah rapat;
- 9) Menyusun program dan mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- 10) Menyusun program, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penganggaran dan fasilitasi pengawasan.

Uraian tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- 2) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara
- 3) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- 4) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- 6) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati;
- 7) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 8) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi aspirasi masyarakat;
- 9) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- 10) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pelaksanaan penegakan Kode Etik DPRD;
- 11) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 12) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 13) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 14) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan memverifikasi persetujuan Kerja sama Daerah; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- 2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- 3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, pangkat, golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjalankan aktifitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data pada grafik 2.1, didapatkan sebaran pegawai berdasarkan golongan ruang yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan



Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Tapin

Berdasarkan data pada grafik 2.1 di atas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan golongan ruang yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.2

Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Tapin

Berikut data grafik 2.3 juga maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.3
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Tapin

Berdasarkan gambar komposisi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, dapat disebutkan bahwa pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 5 (lima) orang, untuk Strata 1 (S1) sebanyak 13 (tiga belas) orang, kemudian untuk pegawai yang berpendidikan Diploma 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) orang, dan yang terakhir untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6 (enam) orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin (50%) berpendidikan jenjang Strata 1 (S1).

Spesifikasi pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin terdapat variasi serta mendukung dengan fungsi Sekretariat DPRD guna menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara kuantitas, Sekretariat DPRD masih terdapat kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dikarenakan hanya memiliki 26 (dua puluh enam) PNS, kemudian dari segi kualitas sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sudah baik, akan tetapi masih tetap perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya sebagai PNS, hal ini disebabkan oleh dinamika peraturan yang semakin kompleks serta tuntutan pekerjaan berkenaan dengan peningkatan kinerja PNS.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tapin sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, maka diharapkan dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten serta berlatar belakang yang sesuai maka akan lebih mudah lagi mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Sekretariat DPRD.

2. Aset

Di samping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak bisa kita kesampingkan dalam menunjang serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kita di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin guna mencapai target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Adapun inventaris barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sarana - Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	Sedan	1
2	Station Wagon	1
3	Sepeda Motor	5
4	Meja Rapat	3
5	Mini Bus	1
6	Mebeleur lainnya	5
7	Lemari Buku Arsip	16
8	Kursi Tamu	4
9	Tiang Bendera	2
10	Mimbar / Podium	1
11	Lemari Buku untuk Perpustakaan	14
12	Alat kantor lainnya	20
13	Alat Detektor barang terlarang/ X-ray	1
14	Alat Sidik Jari	6
15	Papan Pengumuman	2
16	Jam Mekanis	21
17	Wireless	6
18	Dispenser	7
19	Alat rumah tangga lainnya	22
20	Meja Kerja Pegawai non Struktural	48
21	Microphone	22
22	Unitteroptible	2
23	Power Amplifier	5
24	Lensa Kamera	1
25	Net book	9
26	Hard Disk	9
27	Peralatan Main Freme	4
28	Peralatan Mini Kom Lainnya	1
29	Printer (Peralatan Personal Kom. Lainnya)	63
30	Server	1
31	Router	3
32	Transportable Generating Set	1
33	Lemari Makan	3
34	Tempat Tidur Besi	3
35	Sofa	3
36	Lemari Es	6

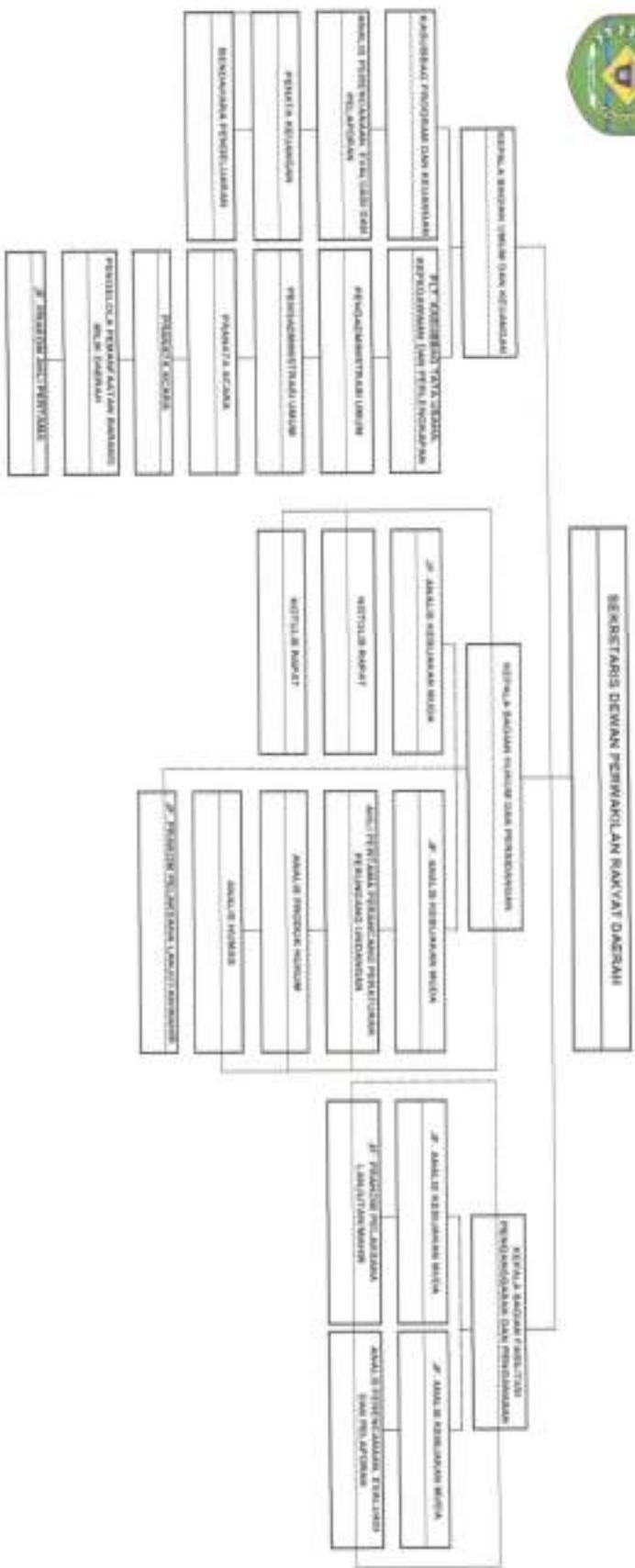
37	AC (Air Conditioner)	44
38	Sound System	2
39	Pesawat Telepon	2
40	P.C Unit	34
41	Lemari Kaca	5
42	Alat Penghancur Kertas	3
43	Peralatan Studio Audio lainnya	11
44	Rak Peralatan	7
45	Peralatan Pemancar UHF	1
46	Papan Absen	30
47	Layar Film	3
48	Camera Vidio	7
49	Handycom	1
50	Laptop	18
51	Lemari Kayu	6
52	TV	6
53	Loudspeaker	10
54	Camera elektronik	2
55	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
56	Scanner	2
57	Papan Nama / Papan Visual	1
58	Meja Receptionist	1
59	Mesin Penghisap Debu (Vaccum Cleaner)	3
60	Meja Kerja Besi	24
61	Kursi Rapat	120
62	Alat Pembersih Lainnya	2
63	Karpet	5
64	Air Cleaner	27
65	Meja Pejabat Eselon I/Wagub/Wakil Bupati/Walikota	1
66	Meja Kerja Pejabat Lainnya	1
67	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	7
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	79
69	Kursi Hadap Depan Meja Ketua /Wakil DPRD	2
70	Audio Mixing Console	4
71	Audio Ampflier	2
72	Stabilizing Amplifer	2
73	Stabilizer	2
74	CCTV	2
75	Bracket Standing Peralatan	2
76	LCD Monitor	1
77	Antena All Band	10

78	Cover Survencase CCTV System	1
79	Hub	3
	Total	819

Bag 1



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, target capaian kinerja Tahun 2022 dan aspek strategis Daerah Tahun 2022 maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Aspek strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Beberapa hal dasar pertimbangan dalam pemilihan Aspek strategis di Kabupaten Tapin yaitu:

1. Merupakan tugas dan tanggungjawab Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin
2. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
3. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
4. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
5. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
6. Janji politik yang harus diwujudkan.

Aspek strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Fasilitasi Rapat-rapat DPRD Tepat Waktu;
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Guna Menunjang Pelaksanaan Kinerja;
3. Peningkatan Fasilitasi Reses Melalui Peningkatan Pokok-pokok Pikiran.

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menghadapi berbagai kendala dan hambatan ada beberapa isu strategis yang perlu di pertimbangkan dan disikapi secara arif dan bijaksana serta proaktif dengan melihat peluang dan kesempatan yang ada.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sebagian staf aparatur masih kurang dalam wawasan tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD;
2. Kualitas kemampuan, keterampilan/skill aparatur masih rendah;
3. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
4. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;

5. Kurangnya personalia dan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis;
6. Masih belum optimalnya peran Sekretariat DPRD sebagai jembatan penghubung antara kemitraan yang harmonis antara Eksekutif-Legislatif.
7. Belum disusunnya SOP Sekretariat DPRD.

D. TINDAK LANJUT TERHADAP LHE TAHUN 2020

URAIAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP

NO	UNIT KERJA NOMOR LHE	TEMUAN	REKOMENDASI	KATEGORI TINDAK LANJUT		
				S	DP	B
1	2	3	4	5	6	7
	700/013 /LHE.AKIP /2021	<p>a. Perencanaan Kinerja</p> <p>1. Capaian/target kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan (reward)</p> <p>b. Pengukuran Kinerja</p> <p>1. IKU belum dijadikan dasar penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, promosi maupun penurunan jabatan</p> <p>2. SOP monitoring</p>	<p>1. Agar capaian/target kinerja dapat dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan (reward)</p> <p>1. Agar IKU dapat dijadikan dasar penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, promosi maupun penurunan jabatan</p> <p>2. Agar membuat</p>	√		
				√		
				√		

		kinerja	SOP Monitoring Kinerja			
		3. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	3. Agar hasil pengukuran kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	√		

Untuk laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten sudah melengkapi tindak lanjut yang direkomendasikan.

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, di mana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Sekretariat DPRD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
2. Meningkatkan Kualitas SDM ASN Sekretariat DPRD
3. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD
4. Meningkatkan kualitas hasil monitoring dan evaluasi kerja
5. Meningkatkan dukungan terhadap kelembagaan DPRD

2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut:

1. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif
3. Meningkatnya Kualitas SDM ASN Set.DPRD
4. Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD
5. Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja dan Administrasi Keuangan
6. Meningkatnya dukungan dalam peningkatan Kualitas SDM DPRD

Tujuan dan sasaran strategis serta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1	2	4	5
Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Terakomodirnya Pelayanan dan Fasilitasi Kegiatan Anggota DPRD	Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu
		Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir
		Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan, jika ditemukan ketidakberhasilan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokus pada *internal business process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Uraian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD dan penjelasan/perhitungan IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
RESTRUKTURISASI KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelas/ Form Perhitungan	Sumber Data	Pemangung Jawab
1 Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD	2 Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	3 Nilai Rata-rata unsur pelayanan Tahun n X Nilai Penimbang (Nilai Penimbang adalah 25) (Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara no.Kop/25/M.PAN/2004)	4 Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	5 Bagian Umum dan Keuangan
Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan		$\frac{\text{Jumlah Kuypilatu Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Komplain}} \times 100\%$		Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

<p>Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD</p>	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang difasilitasi}}{\text{Jumlah permintaan tindak lanjut hasil kunjungan kerja DPRD}} \times 100\%$	<p>Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan</p>
<p>Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah naskah akademik yang terfasilitasi diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Naskah Akademik Yang Direncanakan}} \times 100\%$	<p>Pengawasan Bagian Hukum dan Persidangan</p>
<p>Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Risalah Rapat Dewan Yang terselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Risalah Rapat Yang Harus Dibuat}} \times 100\%$	<p>Bagian Hukum dan Persidangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan</p>
<p>Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat</p>	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi Yang Terakomodir}}{\text{Jumlah Aspirasi Yang Masuk}} \times 100\%$	<p>Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan</p>

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, berikut ikhtisar perjanjian kinerja berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022 :

IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TAHUN : 2022

No	Eselon	Sasaran Strategis	3	Indikator Kinerja	4	Target 2022	5
1	2						
1	Eselon II	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD		Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD		80	
				Persentase complain anggota Dewan yang dapat diselesaikan		100%	
				Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD		100%	
				Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu		80%	
				Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu		90%	
				Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir		65%	
		Terakomodirnya Aspirasi masyarakat					

		Meningkatkan keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%
	Eselon III	Meningkatkan Kapasitas SDM	Persentase Aparatur sesuai kompetensinya	80%
		Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Kegiatan Dewan yang Terasilitasi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80%
		Meningkatkan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80%
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80%
	Eselon III	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persentase Kegiatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat yang terselesaikan Tepat Waktu	80%
		Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi	80%
		Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Persentase rapat-rapat dewan yang memenuhi korum	80%

Bab II

Eselon III	Meningkatkan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%
	Tertaksamnya kegiatan reses Anggota DPRD	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 Kali
Eselon IV	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Persentase rapat-rapat Anggaran dan Pengawasan dewan yang memenuhi korum	80%
	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya data dan administrasi kepegawaian	12 Bulan
Eselon IV	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	12 Bulan
	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan administrasi keuangan, semesteran, Akhir tahun dan lain-lain yang tersedia	100%
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Terlaksananya Fasilitas Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Terlaksananya Program Penyusunan Kerja DPRD	12 Bulan
		Pelayanan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	12 Bulan

			Tertindakannya Kegiatan Rapat Dengar Pendapat	12 Bulan
	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Tersedianya Informasi Kegiatan DPRD	Tertindakannya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Paket
			Tertindakannya Penyusunan Komunikasi dan Publikasi	1 Paket
	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Tertindakannya kegiatan fasilitasi Rapat-rapat Penganggaran DPRD dan bertanggung jawaban DPRD	Tertindakannya rapat-rapat pembahasan anggaran dan bertanggung jawaban APBD	1 Paket
	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Tertindakannya Fasilitasi Kegiatan pengawasan yang terlaksana	Tertindakannya Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Bulan
			Membandingkan dan menyelaraskan Pokok Pikiran DPRD dengan RPJMD	100%

Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai berikut:

No	Staff/IF	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
	Staf Bagian Umum dan Keuangan	Merencanakan dan melakukan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya data seluruh barang milik daerah ke dalam kartu inventaris barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI) dan buku Induk Inventaris (BI) sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.	200 Buah
	Staf Bagian Umum dan Keuangan	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya data barang milik daerah termasuk Kartu Inventaris Barang (KIB), Sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.	100 Buah
	Staf Bagian Umum dan Keuangan	Meningkatkan pengembungan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan keuangan dan menyimpulkan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang telah di verifikasi sesuai prosedur dan ketentuan.	12 Laporan
	Staf Sub Bagian Program dan Keuangan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya surat pertanggungjawaban (SPJ) Berdasarkan Buku Kas umum	12 Laporan
	Staf Sub Bagian Program dan Keuangan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Data usulan program dan kegiatan dari semua Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab Tapin.	3 Dokumen

Bab II

			<p>Tersedia draft Konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Draft Konsep Rencana Kerja (RENIA), draft Konsep Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), draft Konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT), draft Konsep Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kab. Tapin</p>	6 Dokumen
	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	<p>Tersedianya data kepegawaian pada buku penjiwaan agar memudahkan pencarian dan pengendalian tahapan</p>	13 Berkas
	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	<p>Tersedianya data kepegawaian pada buku penjiwaan agar memudahkan pencarian dan pengendalian tahapan</p>	13 Berkas
	Staf Bagian Umum dan Perencanaan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	<p>Tersedianya data kepegawaian pada buku penjiwaan agar memudahkan pencarian dan pengendalian tahapan</p> <p>Tersedianya Peraturan dan pengendalian surat masuk, surat keluar sesuai dengan standart Operasional Prosudur (SOP) Tahapan</p>	240 Kalf

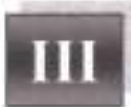
Bab II

	Staf Bagian Umum dan Perlengkapan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya daftar urut kepegawaian (DUK) Nonimatif pegawai dan data kebutuhan pegawai agar tersedia data kepegawaian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap	240 Kali
	Staf Sub Bagian Fasilitas Penganggaran	Terlaksananya kegiatan fasilitas Rapat-rapat Penganggaran DPRD dan pertanggung jawaban DPRD	Tersedianya bahan dan menyusun bahan pembahasan APBD/ APBD-P, Pertanggung jawaban APBD dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3 Berkas
			Tersedianya bahan dan menyusun laporan kinerja dan rencana fasilitas Penganggaran	3 Berkas
	Staf Sub Bagian Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan dan Pengawasan	Tersedianya Bahan Bahan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD dalam rangka Penyelenggaraan Aspirasi Masyarakat dan Pokok - Pokok Pikiran	3x Masa Reses
			Tersedianya Hasil Pokok-pokok Pikiran sesuai catatan hasil reses dan masukan anggota DPRD untuk persetujuan dan penyetapan lebih lanjut	1 hasil pokok pokok pikiran
	Staf Bagian Hukum dan Perencanaan	Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Tersedianya bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)	20 Paket

Bab II

			Tersedianya bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait	20 Paket
	Staf Sub Bagian Perundang-undangan dan Humas	Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Tersedianya konsep Naskah Akademik Raperda Inisiatif sesuai petunjuk teknis dan menjadi bahan kelengkapan penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda dan penetapan Raperda Inisiatif DPRD.	6 dokumen
	Staf Sub Bagian Perundang-undangan dan Humas	Meningkatnya kualitas fasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapan Siap Sesuai Jadwal dan terdokumentasi secara digitalisasi dengan baik	100% 92 kali rapat
	Staf Kasubag Perundangan dan Risetlah	Tertelaksunanya Fasilitasi Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Tersedianya dokumen risalah, resume, atau intisar, serta laporan hasil pelaksanaan rapat DPRD, sesuai prosedur dan jenis yang berlaku untuk menjadi bukti hasil rapat dan bahan selanjutnya.	24 Dokumen
	Staf Sub Bagian Risetlah dan Perundangan	Tertelaksunanya Fasilitasi Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Tersedianya laporan pelaksanaan tugas hasil rapat kerja DPRD	12 Berkas

I. BAB



AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2022 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Dalam rangka mengukur kinerja serta untuk lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)* yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yakni :

1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2022

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis ditetapkan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, rata-rata Capaian IKU pada Tahun 2022 adalah **93,8%**.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	91,2	114%

• Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD

Adapun Formula rumusan pengukuran Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD berdasarkan keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no.Kep/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yaitu Nilai Rata-Rata Unsur Tertimbang X Nilai Penimbang (dengan Nilai Penimbang sudah ditetapkan=25).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survey Indeks kepuasan Masyarakat kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin sebagai responden dengan metode Penyebaran angket Quisioner.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus $\text{Bobot nilai rata-rata Jumlah bobot 1} = \text{tertimbang Jumlah Unsur} = 9 = 0,111$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur IKM = Total unsur yang terisi X Nilai penimbang dengan nilai dasar 25, dengan rumus $\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Tahun 2022 dapat ditelusuri pada tabel tabel berikut :

ΣNilai /Unsur	89	91	92	96	89	89	87	91	98
NRR / Unsur	3,560	3,640	3,680	3,840	3,560	3,560	3,480	3,640	3,920
NRR tertbg/ unsur	0,395	0,404	0,408	0,426	0,395	0,395	0,386	0,404	0,435
IKM Unit pelayanan								3,650	91,242

Keterangan :
 - U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
 = Nilai
 - NRR rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi
 NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,560
		3,640
U2	Prosedur Pelayanan	
U3	Kecepatan Pelayanan	3,680
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,840
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,560
U6	Kompetensi Petugas	3,560
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,480
U8	Penanganan Pengaduan	3,640
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,920

IKM UNIT PELAYANAN : 91,2

Mutu Pelayanan : Sangat Baik

Dari Tabel diatas dapat di uraikan bahwa Berdasarkan hasil Kuisisioner Indeks Kepuasan Pelayanan kepada 25 orang Responden dalam hal ini Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin dapat diperoleh Capaian 91,2 atau 114% dari Target 80.

Kualitas Peningkatan Pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin sesuai sasaran indeks Kepuasan dinilai dari 9 unsur Pelayanan yang termuat dalam kuisisioner/ angket indeks Kepuasan Masyarakat yang diberikan kepada para responden yaitu Pimpinan dan anggota DPRD berjumlah 25 orang. 9 unsur yang dirumuskan pada kuisisioner yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, penanganan pengaduan, kualitas sarana dan prasarana. Adapun aspek pelayanan yang dinilai dari ke-9 unsur tersebut adalah:

1. Pelayanan Kesekretariatan pada umumnya
2. Pelayanan Peningkatan Kapasitas/SDM Pimpinan dan Anggota
3. Pelayanan Fasilitasi Rapat
4. Pelayanan Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Pelayanan Kehumasan dan Protokol
7. Pelayanan Kegiatan Reses

Kenaikan nilai indeks itu dapat dilihat dari naiknya penilaian pada Beberapa unsur dengan rincian sebagai berikut :

- Unsur 1 (Kesesuaian Persyaratan)

Dari 25 responden pada tahun 2022 11 orang memberikan nilai sesuai dan 14 orang menyatakan sangat sesuai.

- Unsur 2 (Prosedur Pelayanan)

Dari 25 responden pada tahun 2022 19 orang memberikan nilai sesuai dan 6 orang menyatakan sangat sesuai.

- Unsur 3 (Kecepatan Pelayanan)

Dari 25 responden pada tahun 2022 17 orang memberikan nilai sesuai dan 8 orang menyatakan sangat baik.

- Unsur 4 (Kesesuaian/Kewajaran Biaya)

Dari 25 responden pada tahun 2022 4 orang memberikan nilai sesuai dan 19 orang menyatakan sangat sesuai.

- Unsur 5 (Kesesuaian Pelayanan)

Dari 25 responden pada tahun 2022 11 orang memberikan nilai sesuai dan 14 orang menyatakan sangat sesuai.

- Unsur 6 (Kompetensi Petugas)

Dari 25 responden pada tahun 2022 11 orang memberikan nilai sesuai dan 14 orang menyatakan sangat sesuai.

- Unsur 7 (Perilaku Petugas Pelayanan)

Dari 25 responden pada tahun 2022 13 orang memberikan nilai sesuai dan 12 orang menyatakan sangat sesuai.

- Unsur 8 (Penangan Pengaduan)

Dari 25 responden pada tahun 2022 9 orang memberikan nilai sesuai dan 14 orang menyatakan sangat sesuai.

- Unsur 9 (Kualitas sarana & Prasarana)

Dari 25 responden pada tahun 2022 2 orang memberikan nilai sesuai dan 23 orang menyatakan sangat sesuai.

Untuk indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD Adapun program & kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	32.323.581.198
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.380.730.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	668.730.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Kantor DPRD	712.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	244.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.663.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	460.010.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	364.653.600
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.430.792.700
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.983.657.200
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	372.135.500
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75,000,000

Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	21.626.385.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.244.426.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.381.959.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Komplain anggota dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100 %

- Persentase Komplain anggota dewan yang dapat diselesaikan

Keluhan atau komplain pelayanan adalah ekspresi perasaan ketidakpuasan atas standar pelayanan, tindakan atau tidak adanya tindakan Sekretariat yang berpengaruh terhadap kegiatan anggota DPRD.

Indikator kinerja ini bertujuan sebagai alat kendali dan evaluasi terhadap pemberian kualitas pelayanan, meminimalkan kekecewaan pihak yang diberikan fasilitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan pihak yang difasilitasi, dalam hal ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Tapin. Obyek komplain dapat berupa keluhan terhadap layanan administrasi, layanan kegiatan DPRD, kesiapan, kebersihan dan kelayakan sarana dan prasarana.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin selama tahun 2022 menerima semua keluhan anggota DPRD terhadap pelayanan kesekretariatan dan merangkumnya dalam daftar Komplain dari anggota DPRD. Adapun tindak lanjut upaya Sekretariat DPRD adalah dengan melakukan penyelesaian terhadap obyek komplain anggota DPRD.

Maksud dari penyelesaian diatas adalah suatu langkah yang diambil baik berupa tindakan langsung, perbaikan, evaluasi, dan rencana perbaikan yang hasilnya disampaikan kepada anggota DPRD, baik secara langsung maupun dalam rapat koordinasi internal.

Daftar Komplain Anggota DPRD Kabupaten Tapin terhadap Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Jenis Obyek Komplain	Uraian Komplain	Sumber Data
1	Prasarana	1. Ruang rapat komisi yang belum	Rapat internal (7)

		<p>selesai di lengkapi fasilitasnya</p> <p>2. Kondisi foto foto pimpinan DPRD di ruang paripurna belum tersusun dan tertata rapi</p> <p>3. Kondisi cat gedung sudah kusam, perlu di barukan kembali</p> <p>4. Untuk drainase dibelakang agar dipercepat penyelesaiannya</p>	<p>Rapat internal (4)</p> <p>Rapat internal (3)</p> <p>Pernyataan langsung (3)</p>
		<p>5. Masih terdapat barang barang di tempat untuk parkir mobil, sehingga tempat parker kurang dapat dimaksimalkan</p> <p>6. Kursi tamu di ruangan Pimpinan sudah terlalu lama</p> <p>7. Untuk kamar mandi wakil pimpinan masih terdapat rembesan air dari atas/dak</p> <p>8. Kamar mandi untuk pimpinan perlu ditata ulang</p>	<p>Pernyataan langsung (3)</p> <p>Pernyataan langsung (1)</p> <p>Pernyataan langsung (1)</p> <p>Pernyataan langsung(1)</p>
2	Sarana	<p>9. Konektifitas jaringan wifi belum maksimal untuk di ruang Ketua dan Wakil Ketua</p> <p>10. TV untuk informasi dimuka yang sudah tidak bisa berfungsi lagi</p> <p>11. Tempat sampah sudah kurang layak untuk dipakai</p> <p>12. Laptop yang masih kurang untuk segera didatangkan mengingat sudah lewat waktu batas pengadaan</p>	<p>Pernyataan Langsung (1)</p> <p>Pernyataan langsung (3)</p> <p>Pernyataan Langsung (2)</p> <p>Rapat internal (3)</p>
3	Layanan Pendampingan	<p>13. Dalam hal pendampingan kalau bisa ada juga kabag yang mendampingi</p> <p>14. Pendamping agar lebih cekatan dan komunikatif</p> <p>15. Untuk susunan pendamping agar ditetapkan terlebih dahulu, kemudian disampaikan ke Sekretaris DPRD untuk diminta persetujuannya</p>	<p>Rapat internal (1)</p> <p>Rapat internal (4)</p> <p>Rapat internal (5)</p>
4	Layanan Rapat	-	-
5	Layanan Administrasi	<p>16. Keterlambatan penyelesaian SPJ yang berhubungan dengan kegiatan DPRD, agar tidak ada lagi keluhan dari DPRD</p> <p>17. Untuk transfer/pinbuk yang masuk kerekening agar disesuaikan dengan judul</p> <p>18. Terkait dengan pembuatan SPT dan</p>	<p>Rapat internal (4)</p> <p>Rapat internal (5)</p> <p>Rapat internal (5)</p>

	SPPD jangan hanya ditugaskan di satu orang, guna kelancaran administrasi	
	JUMLAH KOMPLAIN	56

Sasaran dan Tujuan Umum dan Kegiatan

Tindak Lanjut Penyelesaian Komplain Anggota DPRD Kabupaten Tapin dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Jenis Obyek Komplain	Uraian Komplain	Penyelesaian Komplain
1	Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rapat komisi yang belum selesai di lengkapi fasilitasnya 2. Kondisi foto foto pimpinan DPRD di ruang paripurna belum tersusun dan tertata rapi 3. Kondisi cat gedung sudah kusam, perlu di barukan kembali 4. Untuk drainase dibelakang agar dipercepat penyelesaiannya 5. Masih terdapat barang barang di tempat untuk parkir mobil, sehingga tempat parkir kurang dapat dimaksimalkan 6. Kursi tamu di ruangan Pimpinan sudah terlalu lama 7. Untuk kamar mandi Pimpinan masih terdapat rembesan air dari atas/dak 8. Kamar mandi untuk pimpinan perlu ditata ulang 	<p>Menyampaikan bahwa untuk rapat ruang komisi akan segera dilengkapi pada tahun 2023.</p> <p>Menyampaikan bahwa untuk foto foto beserta penataannya akan dilakukan pada tahun 2023 dengan pola yang lebih bagus dan lebih rapi.</p> <p>Akan dilakukan renovasi langsung di triwulan 4 (empat) pada tahun 2022.</p> <p>Menyampaikan akan segera dilakukan percepatan penyelesaian drainase tersebut.</p> <p>Menyampaikan bahwa segera menindaklanjuti penataan ruang parkir yang akan dilakukan pada triwulan pertama tahun 2023 (3)</p> <p>Sudah dilakukan pemesanan dan akan terealisasi pada triwulan 1 (satu) 2023 (1)</p> <p>Menyampaikan akan segera ditindaklanjuti dan dilakukan rehab pada tahun 2023</p> <p>Menyampaikan akan segera ditindaklanjuti dan dilakukan rehab pada tahun 2023</p>
2	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> 9. Konektifitas jaringan wifi belum maksimal untuk di ruang Ketua dan Wakil Ketua 10. TV untuk informasi dimuka yang sudah tidak bisa berfungsi lagi 11. Tempat sampah sudah kurang layak untuk dipakai 	<p>Segera melakukan perbaikan jaringan wifi</p> <p>Langsung melakukan servis terhadap tv tersebut</p> <p>Langsung mengganti tempat sampah dengan kualitas yang bagus</p>

		12. Laptop yang masih kurang untuk segera didatangkan mengingat sudah lewat waktu batas pengadaan	Menyampaikan langsung kepada yang melaksanakan agar segera diselesaikan
3	Layanan Pendampingan	13. Dalam hal pendampingan kalau bisa ada juga kabag yang mendampingi 14. Pendamping agar lebih cekatan dan komunikatif 15. Untuk susunan pendamping agar ditetapkan terlebih dahulu, kemudian disampaikan ke Sekretaris DPRD untuk diminta persetujuannya	Menyusun pendamping dengan kolaborasi 3 (tiga) Kabag Segera meningkatkan kemampuan pendamping dalam melaksanakan tugasnya serta menekankan penerapan SOP pendampingan. Menyampaikan bahwa segera untuk dilaksanakan sesuai dengan arahan.
4	Layanan Rapat	-	-
5	Layanan Administrasi	16. Keterlambatan penyelesaian SPJ yang berhubungan dengan kegiatan DPRD, agar tidak ada lagi keluhan dari DPRD 17. Untuk transfer/pinbuk yang masuk kerekening agar disesuaikan dengan judul 18. Terkait dengan pembuatan SPT dan SPPD jangan hanya ditugaskan di satu orang, guna kelancaran administrasi	Segera meningkatkan lagi kinerja dalam penyelesaian administrasi kepada setiap penanggungjawab penyelesaian pertanggungjawaban Menyampaikan akan langsung berkoordinasi dengan pihak bank terkait dengan narasi transfer. Segera membentuk tim dalam hal pembuata surat tugas dan surat perintah perjadiin guna lebih lancarnya pekerjaan administrasi tersebut sesuai dengan arahan
		JUMLAH KOMPLAIN	56

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

Dari daftar komplain dapat digambarkan jumlah total keseluruhan komplain adalah 56 yang terbagi ke dalam 5 kategori layanan yang terdapat komplain.

Uraian Komplain	Jumlah komplain	Komplain yang dapat diselesaikan	Keterangan
1. Ruang rapat komisi yang belum selesai di lengkapi fasilitasnya	7	7	Sebagian besar penyelesaian ditahun anggaran 2023
2. Kondisi foto foto pimpinan DPRD di ruang paripurna belum tersusun dan tertata rapi	4	4	Akan diselesaikan pada tahun anggaran 2023
3. Kondisi cat gedung sudah kusam, perlu di barukan kembali	3	3	Sudah terselesaikan pada tahun 2022, pada Desember 2022
4. Untuk drainase dibelakang agar dipercepat penyelesaiannya	3	3	Terselesaikan pada tahun 2022
5. Masih terdapat barang barang di tempat untuk parkir mobil, sehingga tempat parker kurang dapat dimaksimalkan	3	3	Sebagian besar akan diselesaikan pada tahun 2023
6. Kursi tamu di ruangan Pimpinan sudah terlalu lama	1	1	Akan terselesaikan pada tahun anggaran 2023 sekitar bulan Maret April
7. Untuk kamar mandi wakil pimpinan masih terdapat rembesan air dari atas/dak	1	1	Akan selesai pada tahun 2023
8. Kamar mandi untuk pimpinan perlu ditata ulang	1	1	-idem-
9. Konektifitas jaringan wifi belum maksimal untuk di ruang Ketua dan Wakil Ketua	1	1	Sebagian akan diselesaikan pada triwulan pertama tahun anggaran 2023
10. TV untuk informasi dimuka yang sudah tidak bisa berfungsi lagi	3	3	
11. Tempat sampah sudah kurang layak untuk dipakai	2	2	

12. Laptop yang masih kurang untuk segera didatangkan mengingat sudah lewat waktu batas pengadaan	3	3	
13. Dalam hal pendampingan kalau bisa ada juga kabag yang mendampingi	1	1	Ditindaklanjuti mulai awal tahun anggaran 2023
14. Pendamping agar lebih cekatan dan komunikatif	4	4	-idem-
15. Untuk susunan pendamping agar ditetapkan terlebih dahulu, kemudian disampaikan ke Sekretaris DPRD untuk diminta persetujuannya	5	5	Akan berjalan sepenuhnya mulai januari tahun 2023
16. -	-	-	-
17. Keterlambatan penyelesaian SPJ yang berhubungan dengan kegiatan DPRD, agar tidak ada lagi keluhan dari DPRD	4	4	Segera dijalankan mulai bulan januari tahun 2023
18. Untuk transfer/pinbuk yang masuk kerekening agar disesuaikan dengan judul	5	5	-idem-
19. Terkait dengan pembuatan SPT dan SPPD jangan hanya ditugaskan di satu orang, guna kelancaran administrasi	5	5	-idem-
JUMLAH KOMPLAIN	56	56	

Sumber: Bagian Umum dan Keuangan

Persentase komplain anggota DPRD yang dapat diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah Komplain yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Komplain}} \times 100\%$$

Persentase komplain anggota DPRD yang dapat diselesaikan = $\frac{56}{56} \times 100\%$

Persentase komplain anggota DPRD yang dapat diselesaikan = 100%

Sehingga untuk capaian kinerja didapat dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian untuk indikator kinerja Presentase komplain anggota dewan yang dapat terselesaikan ditahun 2022 adalah 100%

Untuk indikator Persentase Komplain anggota dewan yang dapat diselesaikan, Adapun program dan kegiatan yang menunjang untuk indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	32.323.581.198
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.380.730.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	668.730.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Kantor DPRD	712.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	244.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.663.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	460.010.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	364.653.600
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.430.792.700
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.983.657.200
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	372.135.500
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000

Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	21.626.385.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.244.426.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.381.959.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100 %

- Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD

Berdasarkan data hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tapin tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Tapin selama tahun 2022, berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan maka kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tapin berjumlah 281 Kunjungan Kerja.

No.	Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja
1	Komisi I	87
2	Komisi II	80
3	Komisi III	80
4	AKD/Gabungan/Pansus	23
5	Pimpinan DPRD	146

Sumber data: Rapat 1 bulan dan Kunjungan

Dari hasil kunjungan tersebut terdapat kunjungan yang harus ditindaklanjuti sehubungan dengan kunjungan tersebut terkait dengan perumusan suatu kebijakan publik, kunjungan terkait dengan perbaikan pelayanan Pemerintah Daerah, kunjungan terkait dengan pemberlakuan peraturan baru, dan kunjungan yang terkait dengan usulan program pembangunan.

Tindak lanjut tersebut dapat berupa rapat dengar pendapat, rapat pembahasan rancangan peraturan daerah, rapat pembahasan program pembangunan, kegiatan pengawasan dan evaluasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dalam hal ini melakukan tugas memfasilitasi semua kegiatan tindak lanjut tersebut.

Dalam hal ini Sekretariat DPRD hanya memfasilitasi dan mempersiapkan Permintaan Tindak Lanjut dari hasil kunjungan mereka berupa Rapat Dengar Pendapat, audiensi dll. Dan tidak semua Kunjungan Kerja tersebut ditindaklanjuti.

Sumber data dari permintaan tindak lanjut hasil kunjungan ini maupun kegiatan fasilitasi tindak lanjutnya dapat dilihat dari Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Tapin selama tahun 2022 yang merupakan hasil pembahasan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tapin.

TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI I

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
1	Rabu – Jumat 05 – 07 Jan 2022, ke DPRD Kab Banjar tentang Regulasi Pelaksanaan Pilkades Serentak	Kamis, 23 Juni 2022 Jam 10.00 Wita RDP dengan Dinas PMD Bag Hukum dan Seluruh Camat Tentang Tahapan Pilkades Serentak Di Kabupaten Tapin
2	Minggu – Selasa 09 – 11 Jan 2022, ke Dinas PMD Kabupaten Tabalong Tentang Anggaran Pelaksanaan Pilkades Serentak	
3	Rabu – Sabtu 12 – 15 Jan 2022 Ke Dinas PMD Kabupaten Kapuas dan tentang Anggaran Pilkades Serentak Tahun 2022 Ke DPRD Kabupaten Kapuas Tentang Payung Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak	
4	Kamis – Sabtu 7 – 9 April 2022 ke Dinas P3AKB Kota Banjarbaru Tentang tata Laksana RAN Penurunan Stunting oleh TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	Selasa 19 Juli 2022 Jam 13.30 s/d 16.30 wita RDP dengan DPPKB, DP3A, dan Dinas Sosial Tentang Sinergitas SKPD Terkait Upaya Penurunan Angka Stunting Senin 01 Agust 2022 Jam 14.00 s/d 16.00 wita RDP dengan TIM Percepatan Penurunan Stunting dan Perusahaan Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tapin
5	Senin - Kamis 06 – 09 Juni 2022 ke Ke DPRD Barito Timur tentang Penganggaran dan Pengawasan Sinergitas Penyelenggaraan Persalinan Serta Kesehatan Ibu dan Anak dan Ke DPRD Barito Selatan tentang Penganggaran dan Pengawasan Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Penanganan stunting	
6	Selasa - Rabu 05 - 06 Juli 2022 ke DPRD Kota Banjarmasin Tentang Sinergitas DPRD dan Dinas Terkait dalam Upaya Penurunan Kasus Stunting	
7	Selasa - Rabu 21 – 22 Juni 2022 ke Kembangpol Kota Banjarbaru Tentang Dampak Perubahan Status dari Badan ke kantor terhadap Penganggaran.	Kamis, 29 sept 2022 Jam 10.00 s/d 13.00 Wita RDP dengan BKPSDM, Inspektorat, Badan Kembangpol Linmas, Bag. Hukum, Bag. Pem, Bag. Organisasi Tentang

8	Minggu – Rabu 04 - 07 Sept 2022 ke Kesbangpol Kab Tanah Laut Tentang Peningkatan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol dan Ke DPRD Tanah Bumbu Tentang Penganggaran, Pengawasan Kegiatan Wawasan Kebangsaan	Rencana Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Linmas
---	---	---

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA KOMISI II

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
9	Kamis - Sabtu 15 – 17 Des 2022 Tentang Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pengawasan Kegiatan dan Penanganan Potensi Konflik Kepemudaan (OKP Mandiri dan Nasional) di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya	Senin 26 Des 2022 Jam 09.30 s/d 12.30 Paripurna DPRD dan Seluruh SKPD tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Keolahragaan dan Ranperda Kepemudaan

Sumber data Bagian Umum dan Keuangan

TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA KOMISI III

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
10	Minggu – Selasa 3 – 5 April 2022, Tentang Animo Masyarakat terhadap penyesuaian kenaikan Tarif PDAM ke DPRD Kab. Balangan	Kamis 21 April 2022 Jam 10.00 Wita, RDP Dengan PDAM Rantau Tentang Informasi Perkembangan Animo Masyarakat terhadap Kenaikan Tarif PDAM
11	Kamis – Sabtu 24 – 26 Maret 2022 ke Dinas Perkimtan Kabupaten Kapuas tentang Program DAK dan Pengadaan Tanah	Senin 01 Agust 2022 Jam 14.00 s/d 16.00 wita RDP dengan Dinas Perkimtan Dinas Lingkungan Hidup Dinas PU PR dan Bag
12	Senin – Rabu 24 – 26 Jan 2022 ke Bapenda Kabupaten Banjar Tentang Penganggaran dan Realisasi Penggunaan Tapping Box dan Pengadaan Sarpras Penunjang	Perengkapan tentang - Tentang Realisasi Pengadaan Tanah - Tentang Perluasan Baru TPA dan Sarpras Penunjang Lainnya - Tentang Progress Pembangunan Rumah Sakit Baru serta Penunjang Lainnya - Tentang Asrama Tapin di Banjarmasin
13	Rabu – Jum'at 13 – 15 April 2022 ke Dinas LH Kota	Kamis, 15 Des 2022 Jam 13.30 s/d 16.30 Wita RDP dengan

Banjarbaru Tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan	Dinas LH Tentang Penempatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
--	--

Sumber data: Bagian Umum dan Kesangsi

TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA PANSUS B

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
14	Selasa - Kamis 14 – 16 Juni 2022 ke DPRD Kab Tanah Bumbu Tentang Kaji Banding Materi Ranperda Kepemudaan	Kamis, 23 Juni 2022 Jam 11.00 Wita Tentang Ranperda Kepemudaan
15	Senin – Rabu 25 - 27 Juli 2022 ke Kota Palangkaraya Tentang Kaji Banding Ranperda Kepemudaan	Jum'at 19 Agust 2022 Jam 20.15 s/d 23.30 Wita Rabu ,07 sept 2022 Jam 20.15 s/d 23.45 Wita, Jum'at ,09 sept 2022 Jam 20.15 s/d 23.45 Wita Rabu,21 sept 2022 Jam 10.00 s/d 13.00Wita, Kamis,06 Okt 2022 Jam 10.00 s/d 12.00Wita, Senin,10 Okt 2022 Jam 10.00 s/d 12.00WitaRapat Pembahasan DPRD dan <ul style="list-style-type: none"> ✓ BKAD ✓ Dispora ✓ Disbudpar ✓ Dispertan ✓ Disdik ✓ Kankesbangpol ✓ Bag Hukum ✓ MPI ✓ KNPI ✓ Perwakilan KM Tapin ✓ Perwakilan Pemuda NU ✓ Perwakilan Pemuda Muhammadiyah ✓ WAPDA ✓ PP Assuniyah ✓ PP Subulussalam ✓ PP Ummu Salamah ✓ Forum Komunikasi Petani Milenial ✓ Gelas Budaya ✓ Bilik Budaya; Tentang Ranperda Kepemudaan
		Selasa,11 Okt 2022 Jam 13.00 s/d 16.30Wita, Senin,17 Okt 2022 Jam 11.00 s/d 14.30 Wita,

	<p>Senin,31 Okt 2022 Jam 20.15 s/d 23.45 Wita, Selasa,01 Nov 2022 Jam 20.15 s/d 23.30Wita Rapat Pembahasan dengan BKAD,Dispora, Disbudpar, Dispertan, Disdik, Dinas Perindustrian, Bankesbangpol, BagHukum, MPI, KNPI, Perwakilan KM Tapin, Perwakilan Pemuda NU, Perwakilan Pemuda Muhammadiyah, WAPDA, PP Assuniyah, PP Subulussalam, PP Ummu Salamah, Forum Komunikasi Petani Milenial, Gelas Budaya, Bilik Budaya, Kompas Tapin HMI Tapin PMII Tapin HIPMI Tapin PMI Tapin Tentang Ranperda Kepemudaan</p> <p>Senin,07 Nov 2022 Jam 14.30 s/d 16.30 Rapat Pembahasan dengan BKAD,Dispora, Disbudpar, Dispertan, Disdik, Dinas Perindustrian, Bankesbangpol, BagHukum tentang Tentang Ranperda Kepemudaan</p>
--	--

Sumber data: *Bagian Umum dan Keuangan*

TINDAK LANJUT KUNJUNGAN BAPEMPERDA

No	Kunjungan Kerja	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja
16	<p>Selasa – Jum'at 15 – 18 Nov 2022 Hari I Tentang Regulasi dan Kebijakan Daerah terhadap Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pengawasan Kegiatan dan Penanganan Potensi Konflik Kepemudaan (OKP Mandiri dan Nasional) Tingkat Kecamatan dan Kabupaten di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin Hari II Tentang Regulasi dan Kebijakan Daerah terhadap Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pengawasan Kegiatan dan Penanganan Potensi Konflik Kepemudaan (OKP Mandiri dan Nasional) Tingkat Kecamatan dan Kabupaten di DPRD Kota Palangka</p>	<p>Senin 26 Des 2022 Jam 09.30 s/d 12.30 Paripurna DPRD dan Seluruh SKPD tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Keolahragaan dan Ranperda Kepemudaan</p>

Raya

Sumber: data Rapat Kerja dan Kunjungan

Dari data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari Hasil Kunjungan Kerja DPRD hanya 16 item yang ditindak lanjuti. Sehingga Sekretariat DPRD selaku memberikan fungsi pelayanan memfasilitasi 16 permintaan tindak lanjut tersebut ke dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat dan audiensi.

Indikator Kinerja Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Persentase tersebut didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang di fasilitasi}}{\text{Jumlah permintaan tindak lanjut hasil kunjungan kerja DPRD}} \times 100\%$$

$$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian inikator Kinerja Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Untuk indikator Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD, Adapun program dan kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	21.626.385.000
Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	21.626.385.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.244.426.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36.748.823.500

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif	80%	75%	93,8%

DPRD	yang terselesaikan tepat waktu			
------	--------------------------------	--	--	--

- Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu

Pada rancangan awal tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin mengalokasikan 12 naskah akademik ranperda yang akan dibahas, akan tetapi karena adanya kekurangan anggaran pada Kegiatan Penyusunan Program Kerja maka anggaran untuk Naskah Akademik Ranperda dikurangi menjadi 8. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin direncanakan pembuatan 8 buah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif dan berhasil terealisasi 6 buah Naskah Akademik Ranperda saja.

Adapun Naskah Akademik Ranperda Inisiatif yang dibuat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	Nama Ranperda	Keterangan
1	Naskah Akademik Ranperda tentang Wajib Baca Tulis Al-Qor'an Bagi Siswa SD sampai dengan SMP Sederajat.	Ranperda Inisiatif DPRD
2	Naskah Akademik Ranperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.	Ranperda Inisiatif DPRD
3	Naskah Akademik Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara.	Ranperda Inisiatif DPRD
4	Naskah Akademik Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.	Ranperda Inisiatif DPRD
5	Naskah Akademik Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.	Ranperda Inisiatif DPRD
6	Naskah Akademik Ranperda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	Ranperda Inisiatif DPRD

Sumber: Data: Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin

Indikator Kinerja Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 75,0% dari target 80% dengan capaian kinerja 93,8% Persentase tersebut didapatkan dari rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang terfasilitasi terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah fasilitasi yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$\frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{75}{80} \times 100\% = 93,8\%$$

PROSES FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

1. PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

- Ranperda Kepemudaan **telah selesai tahap akhir** proses pembentukan peraturan daerah fasilitasi di biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dilakukan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Ranperda Kepemudaan oleh DPRD Kabupaten Tapin.

2. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAERAH

- Ranperda Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah **masih dalam tahap awal** proses pembentukan peraturan daerah, yaitu Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dan akan dilakukan Paripurna Pemandangan Umum oleh DPRD Kabupaten Tapin.

3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

- Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin **telah selesai dalam tahap awal** proses pembentukan peraturan daerah, yaitu Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dan akan dilakukan Paripurna Pemandangan Umum oleh DPRD Kabupaten Tapin.

4. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

- Ranperda Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga **telah selesai dalam tahap awal** proses pembentukan peraturan daerah, yaitu Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dan akan dilakukan Paripurna Pemandangan Umum oleh DPRD Kabupaten Tapin.

5. PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

- Ranperda Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah **masih dalam tahap awal** proses pembentukan peraturan daerah, yaitu Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dan akan dilakukan Paripurna Pemandangan Umum oleh DPRD Kabupaten Tapin.
6. WAJIB BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI SISWA SD SAMPAI SMP SEDERAJAT DI KABUPATEN TAPIN
- Ranperda Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sd Sampai Smp Sederajat di Kabupaten Tapin telah selesai dalam tahap awal proses pembentukan peraturan daerah, yaitu Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dan akan dilakukan Paripurna Pemandangan Umum oleh DPRD Kabupaten Tapin.
7. PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
- Ranperda Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Tapin **telah selesai dalam tahap awal** proses pembentukan peraturan daerah, yaitu Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dan akan dilakukan Paripurna Pemandangan Umum oleh DPRD Kabupaten Tapin.
8. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah **telah selesai tahap akhir** proses pembentukan peraturan daerah fasilitasi di biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dilakukan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Ranperda Kepemudaan oleh DPRD Kabupaten Tapin.
9. PENGELOLAAN SUNGAI
- Ranperda ini sudah difalitasi dengan baik, akan tetapi tidak bisa diteruskan dengan pertimbangan, sebagai berikut :
 - a. terdapat ketidaksesuaian antara materi muatan Ranperda dengan ketentuan pengelolaan sungai yang diatur dalam Pasal 22 ayat (5) UU No. 18 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 - b. PP Pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2019 yang belum ditetapkan; dan
 - c. Keputusan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai sebagai perintah ketentuan Pasal 22 ayat (5) No. 17 Tahun 2019 yang belum ditetapkan.

10. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAPIN

- Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah selesai tahap akhir proses pembentukan peraturan daerah fasilitasi di biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dilakukan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Ranperda Kepemudaan oleh DPRD Kabupaten Tapin.

Untuk indikator Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu, Adapun program dan kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	601.857.600
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	601.857.600
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	137.108.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	244.749.800
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	219.999.800

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya pelayanan terhadap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%	111%

- Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu

Terlaksananya Rapat-rapat DPRD tahun 2022, terdiri dari Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Rapat Kerja, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia khusus, Rapat badang Anggaran (Banggar) Rapat Komisi.

Berdasar Nomenklator, Rapat-rapat yang sifatnya tentang Penganggaran dan Pengawasan di akomodir oleh Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Fasilitasi Pengawasan.

Tentu hal tersebut juga terdapat perbedaan pada pembuatan Risalah Rapat nya. Untuk Bagian

Hukum dan Persidangan dari semua rapat-rapat tersebut dibuat yang dibuat risalah hanyalah rapat-rapat Paripurna Dewan saja. Sedangkan untuk rapat-rapat yang lain hanya dibuatkan Notulen Rapat saja. Pada tahun 2022 tercapai 15 risalah dari 15 Rapat Paripurna Dewan.

No	Nama Risalah	Judul Rapat
1.	Rapat Paripurna Penyampaian dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda dari Pemerintah Kabupaten Tapin Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin Senin, 14 Feb 2022	Rapat Paripurna Penyampaian dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda dari Pemerintah Kabupaten Tapin : 1. Ranperda tentang Keolahragaan Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin : 1. Ranperda tentang Kepemudaan
2.	Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Ranperda dari Pemerintah Kabupaten Tapin Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin Senin, 14 Feb 2022	Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Ranperda dari Pemerintah Kabupaten Tapin : 1. Ranperda Tentang Perubahan Badan hukum Perusahaan Air Minum Kabupaten Tapin menjadi Perusahaan Umum Daerah / Perseroan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin 2. Ranperda Pengelolaan Kekayaan Intelektual 3. Ranperda Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin : 1. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2007 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan 2. Ranperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Rapat Paripurna Internal Kamis, 17 Feb 2022	Rapat Paripurna Internal 1. Penetapan RKA DPRD Tahun 2023 2. Penetapan Pokir DPRD Tahun 2023 3. Penetapan Peraturan DPRD No 01 Tahun 2022 Tentang Tatib DPRD 4. Perubahan Komposisi AKD
4.	Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah Kamis, 31 Maret 2022	Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah
5.	Rapat Paripurna Internal Pembentukan Panitia Panitia Khusus LKPJ Bupati Tapin Tahun 2021 Kamis, 31 Maret 2022	Rapat Paripurna Internal Pembentukan Panitia Panitia Khusus LKPJ Bupati Tapin Tahun 2021
6.	Pendapat Akhir Ranperda Ripparkab Tahun 2022 – 2037 Kamis, 28 April 2022	Pendapat Akhir Ranperda Ripparkab Tahun 2022 - 2037
7.	Rapat Internal Evaluasi Kegiatan DPRD Pada Masa Sidang Pertama Tahun 2022 Senin, 09 Mei 2022	Rapat Internal Evaluasi Kegiatan DPRD Pada Masa Sidang Pertama Tahun 2022
8.	Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Ripparkab Tapin 2022 2032 Rabu, 25 Mei 2022	Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Ripparkab Tapin 2022 2032

No	Nama Risalah	Judul Rapat
9.	Paripurna Internal Pembentukan Panitia Khusus Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe Senin 01 Agust 2022	Paripurna Internal Pembentukan Panitia Khusus Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe
10.	Paripurna Internal Tentang Tindak Lanjut Terhadap Surat Keputusan DPP PKB Senin 01 Agust 2022	Paripurna Internal Tentang Tindak Lanjut Terhadap Surat Keputusan DPP PKB
11.	Rapat Paripurna Intern Penetapan Usul Calon Pengganti Pimpinan DPRD Dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Selasa,20 sept 2022	Rapat Paripurna Intern Penetapan Usul Calon Pengganti Pimpinan DPRD Dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
12.	Paripurna I.Penyampaian II.Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi III.Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Selasa,25 Okt 2022	Paripurna 1. Ranperda dari Pemicab (RTRW) 2. Ranperda Inisiatif 1. Ranperda dari Pemicab (RTRW) 2. Ranperda Inisiatif Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepada Bank Kalsel
13.	Paripurna I.Penyampaian : 1. Ranperda APBD TA 2023 2. Ranperda dari Pemicab 3. Ranperda Inisiatif II.Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap : 1. Ranperda APBD TA 2023 2. Ranperda dari Pemicab 3. Ranperda Inisiatif Senin,31 Okt 2022	Paripurna I.Penyampaian : 1. Ranperda APBD TA 2023 2. Ranperda dari Pemicab 3. Ranperda Inisiatif II.Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap : 1. Ranperda APBD TA 2023 2. Ranperda dari Pemicab 3. Ranperda Inisiatif
14.	Paripurna Istimewa Pemberhentian dan Pelantikan Pimpinan DPRD serta Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin Selasa,08 Nov 2022	Paripurna Istimewa Pemberhentian dan Pelantikan Pimpinan DPRD serta Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin (Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin dari Fraksi PKB)
15.	Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap : Senin 26 Des 2022	Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap : 1. Ranperda Kepemudaan

Sumber Bagian Hukum dan Persidangan

Adapun rapat-rapat yang diselenggarakan pada tahun 2022 yang diakomodir oleh Bagian Hukum dan Persidangan diluar Rapat Paripurna adalah sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
1.	Rabu, 29 Des 2021 Jam 11.00 Wita	Penyusunan Jadwal Lanjutan Kegiatan Bulan Desember 2021 dan Kegiatan Bulan Januari 2022	
2.	Kamis, 30 Des 2021 Jam 10.00 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Pemilihan Kepala Desa Serentak	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
3.	Kamis, 30 Des 2021 Jam 11.00 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Badan hukum Perusahaan Air Minum Kabupaten Tapin menjadi Perusahaan Umum Daerah / Perseroan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin	
4.	Kamis, 30 Des 2021 Jam 14.30 Wita	RDP Retribusi Sewa Toko Pedagang Pasar Rantau	
5.	Senin - Selasa 03 - 04 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Ranperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kab. Tapin	
6.	Selasa, 04 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Retribusi Sewa Toko Pedagang Pasar Rantau (Lanjutan)	
7.	Rabu 05 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Intern Sinkronisasi RKA TA 2022 dan RKA TA 2023	
8.	Rabu, 12 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Sungai	
9.	Rabu, 12 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Ranperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kab. Tapin	
10.	Rabu, 12 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Tentang Retribusi Sewa Toko Pasar Rantau	
11.	Senin, 17 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Dengan Seluruh Camat tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	
12.	Senin, 17 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Tentang Evaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Belanja TA 2021	
13.	Senin, 17 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP PT Bumi Rantau Energi Tentang Pengelolaan Limbah	
14.	Kamis, 20 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP tentang Siaga Bencana Situasi Saat ini Data Laporan (BMKG)	
15.	Kamis, 20 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Realisasi Target Pendapatan TA 2021 dan Proyeksi Target Pendapatan TA 2022	
16.	Kamis, 20 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Tetang Evaluasi Kinerja PUPR Tahun Anggaran 2021	
17.	Kamis, 27 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Dinas Pendidikan tentang Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka	
18.	Senin, 31 Jan 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Banmus Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan Februari 2022	
19.	Rabu, 02 Feb 2022 Jam 10.00 sd 12.30 Wita	RDP Dinas PU PR tentang Realisasi Kegiatan Tahun 2021 dan Program Kegiatan Tahun 2022	
20.	Rabu, 09 Feb 2022 Jam 10.00 wita	RDP Tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	
21.	Rabu, 09 Feb 2022 Jam 10.00 - 12.00wita	RDP Tentang Perparkiran dan Rencana Usulan Keblalalai Transportasi darat di Gambut	
22.	Rabu, 09 Feb 2022 Jam 14.00 - 16.00wita	RDP Tentang Evaluator Tahun 2021 dan Ekspose Tahun 2022	
23.	Senin, 14 Feb 2022 Jam 10.00 sd 11.30 Wita	Rapat Paripurna Penyampaian dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda dari Pemerintah Kabupaten Tapin : 1. Ranperda tentang Keolahragaan Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin : 1. Ranperda tentang Kepemudaan	
24.	Senin, 14 Feb 2022	Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
	Jam 11.30 sd 12.30 Wita	Terhadap Ranperda dari Pemerintah Kabupaten Tapin : 4. Ranperda Tentang Perubahan Badan hukum Perusahaan Air Minum Kabupaten Tapin menjadi Perusahaan Umum Daerah / Perseroan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin 5. Ranperda Pengelolaan Kekayaan Intelektual 6. Ranperda Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin : 3. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2007 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan 4. Ranperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	
25.	Kamis, 17 Feb 2022 Jam 10.00 sd 11.30 Wita	RDP Tentang Realisasi Pembebasan Kota Harapan	
26.	Kamis, 17 Feb 2022 Jam 14.00 sd 16.00 Wita	Rapat Paripurna Internal 5. Penetapan RKA DPRD Tahun 2023 6. Penetapan Pokir DPRD Tahun 2023 7. Penetapan Peraturan DPRD No 01 Tahun 2022 Tentang Taib DPRD 8. Perubahan Komposisi AKD	
27.	Rabu, 23 Feb 2022 Jam 10.00 wita	RDP Tentang Persampahan dan Pagir RTH Pasar Rantau	
28.	Kamis, 24 Feb 2022 Jam 10.00 sd 12.30 Wita	RDP Tentang Kegiatan Tim Monitoring dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa	
29.	Kamis, 24 Feb 2022 Jam 10.00 sd 12.30 Wita	RDP Tentang Evaluasi PTM dan Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia Sekolah Sampai dengan SMP dan Sederajat serta Tunjangan dan Inisiatif Pengajar Paud dan TK	
30.	Kamis, 24 Feb 2022 Jam 14.00 sd 16.30 Wita	RDP Perkembangan Tindak Lanjut Proyeksi Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tapin Tahun 2023	
31.	Selasa 01 Maret 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Bannus Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan Maret 2022	
32.	Selasa, 08 Maret 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Koordinasi Masalah Pasar Keraton dan Masalah Karcis	
33.	Jum'at, 11 Maret 2022 Jam 09.00 Wita	RDP Tentang Kenaikan Tarif PDAM	
34.	Rabu, 16 Maret 2022 Jam 10.00 sd 12.30 wita	AUDIENSI Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan	
35.	Kamis, 17 Maret 2022 Jam 09.00 sd 12.30 wita	EKSPOSE LPPL TAPIN TV TAHUN 2022	
36.	Kamis, 17 Maret 2022 Jam 13.30 sd 16.00 Wita	RDPU Progress Kependudukan Tahun 2022	
37.	Rabu, 23 maret 2022 Jam 10.00 sd 12.30 wita	EKSPOSE Bank Kalsel Tahun 2022	
38.	Rabu, 23 Maret 2022 Jam 13.30 Sd 16.00 Wita	RDPU RTRW Berkaitan dengan Raperda LP2B dan Ripparkab serta Perwilayahan Pendukung Transportasi Umum	
39.	Rabu, 30 Maret 2022 Jam 10.00 sd 12.30	RDPU Dengan Angkutan Batu Bara dan Pengelola SPBU di Kabupaten Tapin Berkaitan dengan kelangkaan BBM jenis	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
	Wita	Solar	
40.	Rabu, 30 Maret 2022 Jam 10.00 sd 12.30 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Keolahragaan	
41.	Rabu, 30 Maret 2022 Jam 13.30 Sd 16.00 Wita	Rapat Pembahasan Raperda Kepemudaan	
42.	Rabu, 30 Maret 2022 Jam 14.00 wita	RDP Tentang Penjaringan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa	
43.	Kamis, 31 Maret 2022 Jam 15.00 sd 16.00 Wita	Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah	
44.	Kamis, 31 Maret 2022 Jam 16.00 sd 17.00 Wita	Rapat Paripurna Internal Pembentukan Panitia Panitia Khusus LKPJ Bupati Tapin Tahun 2021	
45.	Jum'at, 01 April 2022 Jam 09.00 Wita	Rapat Banmus Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan April 2022	
46.	Selasa, 5 April 2022 Jam 20.30 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda RIPPARKAB (dan Materi awal Ranperda Pelestarian Budaya)	
47.	Rabu, 6 April 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Tentang Dukungan Pelebaran Jalan Nasional dari Jalan A. Yani, Tungkup - Bungur	
48.	Rabu, 6 April 2022 Jam 20.30 Wita	Audiens Persiapan Talk Show DPRD-LPPL Tapin TV	
49.	Rabu, 6 April 2022 Jam 20.30 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda RIPPARKAB (dan Materi awal Ranperda Pelestarian Budaya)	
50.	Rabu, 6 April 2022 Jam 20.30 Wita	RDP Tentang LKPJ Bupati Tahun 2021	
51.	Selasa, 12 April 2022 Jam 21.00 - 21.30 wita	Rapat Pembahasan Ranperda Keolahragaan	
52.	Selasa, 12 April 2022 Jam 21.30 -22.00 Wita	Rapat Pembahasan Progress Proyeksi dan perkembangan Kependudukan	
53.	Selasa, 12 April 2022 Jam 22.00 s/d Wita	Audiensi Tentang Sistem Kebijakan PT. KAP dan PT. KIU terhadap karyawan	
54.	Rabu, 13 April 2022 Jam 11.00 Wita	Audiensi Tentang Sistem Kebijakan PT. KAP terhadap karyawan	
55.	Rabu, 13 April 2022 Jam 13.30 Wita	Audiensi Tentang Sistem Kebijakan PT. Kharisma Inti Usaha terhadap karyawan	
56.	Selasa, 19 April 2022 Jam 20.30 Wita	Rapat Koordinasi RTRW Berkaitan dengan LP2B dan Pariwisata serta jaringan Transportasi	
57.	Kamis 21 April 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Dengan PDAM Rantau Tentang Informasi Perkembangan Animo Masyarakat terhadap Kenaikan Tarif PDAM	
58.	Rabu, 27 April 2022 Jam 20.30 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Kepemudaan	
59.	Kamis, 28 April 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2021 Pendapat Akhir Ranperda Ripparkab Tahun 2022 - 2037	
60.	Kamis, 28 April 2022 Jam 12.00 Wita	Rapat Banmus Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan April 2022 Lanjutan Dan Bulan Mei 2022	
61.	Semin, 09 Mei 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Internal Evaluasi Kegiatan DPRD Pada Masa Sidang Pertama Tahun 2022	
62.	Selasa, 10 Mei 2022 Jam 10.00 Wita	Rapat Kerja Tentang Transfer DBH Pemerintah Pusat dan Transfer DBH Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021	
63.	Kamis, 12 Mei 2022	RDPU Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM di	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
	Jam 10.00 Wita	Desa Salam Babaris Dan Desa Pantai Cabe	
64.	Kamis, 12 Mei 2022 Jam 14.00 Wita	Rapat Banmos Penyusunan Jadwal Kegiatan Lanjutan Bulan Mei 2022	
65.	Selasa, 17 Mei 2022 Jam 09.30 sd 12.30	RDPU Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM di Desa Salam Babaris Dan Desa Pantai Cabe	
66.	Selasa, 17 Mei 2022 Jam 13.30 sd 16.00 Wita	RDPU Tentang Sistem Kebijakan PT. KAP terhadap karyawan	
67.	Kamis, 19 Mei 2022 Jam 09.30 sd 11.00 Wita	AUDIENS Penyampaian / Presentasi Bilik Budaya	
68.	Kamis, 19 Mei 2022 Jam 11.30 sd 16.00 Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
69.	Rabu, 25 Mei 2022 Jam 09.30 sd 11.00 Wita	Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Ripparkab Tapin 2022 2032	
70.	Rabu, 25 Mei 2022 Jam 14.00 sd 16.00 Wita	RDP Tentang Pasar Margasari	
71.	Selasa, 31 Mei 2022 Jam 09.30 sd 10.30 Wita	Rapat Koordinasi Ekpose Materi Perubahan RTRW Berkaitan : 1. LP2B 2. Pariwisata 3. jaringan Transportasi Darat dan AIR 4. Kawasan Rawan Bencana 5. Materi Urgent / Penting Lainnya	
72.	Selasa, 31 Mei 2022 Jam 11.00 sd 12.30 Wita	Rapat Banmos Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan Juni 2022	
73.	Jum'at 03 Juni 2022 Jam 14.00 Wita	RDP Tentang Operasional Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Tapin	
74.	Jum'at 03 Juni 2022 Jam 16.00 Wita	Rapat Intern Tentang Hak Keuangan DPRD	
75.	Senin 06 Juni 2022 Jam 09.30 sd 12.00 Wita	RDPU Tentang Sistem Kebijakan PT. KAP terhadap karyawan	
76.	Senin 06 Juni 2022 Jam 13.30 sd 16.00 Wita	RDPU Tentang Pengawasan Terhadap Permasalahan Perusahaan	
77.	Senin 06 Juni 2022 Jam 13.30 sd 16.00 Wita	RDPU Tentang Sistem Kebijakan PT. PAS terhadap Plasma	
78.	Selasa 14 Juni 2022 Jam 09.30 Wita	Uji Publik Ranperda : 1. Wajib Baca Tulis Al Qur'an sd SMP dan Sederajat 2. Pemberantasan Buta Aksara Pelestarian Budaya Daerah	
79.	Kamis, 23 Juni 2022 Jam 10.00 Wita	RDP Tentang Tahapan Pilkada Serentak Di Kabupaten Tapin	
80.	Kamis, 23 Juni 2022 Jam 10.00 sd 11.00 Wita	Audiens Penyampaian /Presentasi Dari Bilik Budaya	
81.	Kamis, 23 Juni 2022 Jam 11.00 Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
82.	Selasa 28 Juni 2022 Jam 10.00 wita sd Selesai	Rapat Pembahasan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD TA 2021	
83.	Rabu 29 Juni 2022	Rapat Pembahasan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
	Jam 09.30 Wita	pelaksanaan APBD TA 2021	
84.	Kamis, 30 Juni 2022 Jam 13.00 sd 15.30 Wita	Rapat Banmus Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan Juli 2022	
85.	Kamis 07 Juli 2022 Jam 09.30 s/d 12.30 wita	Rapat Kordinasi Tentang Subtansi Materi Final Perubahan RTRW	
86.	Kamis 07 Juli 2022 Jam 13.30 sd 16.30 wita		
87.	Sabtu Malam 16 Juli 2022, atau Minggu Malam 17 Juli 2022	Talk Show Tapin TV	
88.	Senin 18 Juli 2022 Jam 09.00 s/d 12.30 wita	RDPU Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe	
89.	Senin 18 Juli 2022 Jam 13.30 s/d 16.30 wita	Rapat Internal Tentang Tindak Lanjut Hasil RDPU Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe	
90.	Selasa 19 Juli 2022 Jam 09.00 s/d 12.30 wita	Uji Publik dari Kemenkumham 1. Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 2. Ranperda Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 3. Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	
91.	Selasa 19 Juli 2022 Jam 13.30 s/d 16.30 wita	RDP Tentang Sinergitas SKPD Terkait Upaya Penurunan Angka Stunting	
92.	Selasa 19 Juli 2022 Jam 13.30 s/d 16.30 wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Keolahragaan	
93.	Senin 25 Juli 2022 Jam 13.30 s/d 16.30 wita	Rapat Koordinasi Tentang Finalisasi Subtansi Materi Final Perubahan RTRW	
94.	Rabu 27 Juli 2022 Jam 20.00 s/d 23.30 wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Keolahragaan	
95.	Kamis 28 Juli 2022 Jam 10.00 s/d 12.30 wita	RDPU Tentang Kebun Plasma Perkebunan Sawit	
96.	Kamis 28 Juli 2022 Jam 13.00 s/d 14.00 wita	Rapat Kocordinasi Tentang Finalisasi Perkembangan Kependudukan Dalam Rangka Pemilihan Umum 2024	
97.	Kamis 28 Juli 2022 Jam 14.30 s/d 15.30 wita	Rapat Banmus Penyusunan Jadwal Kegiatan Lanjutan Bulan Juli dan Bulan Agustus 2022	
98.	Senin 01 Agust 2022 Jam 09.30 s/d 11.00 wita	Paripurna Internal Pembentukan Panitia Khusus Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe	
99.	Senin 01 Agust 2022 Jam 11.00 s/d 12.30 wita	Paripurna Internal Tentang Tindak Lanjut Terhadap Surat Keputusan DPP PKB	
100.	Senin 01 Agust 2022	RDP Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
	Jam 14.00 s/d 16.00 wita	Tapin	
101.	Senin 01 Agustus 2022 Jam 14.00 s/d 16.00 wita	RDP - Tentang Realisasi Pengadaan Tanah - Tentang Perluasan Baru TPA dan Sarpras Penunjang Lainnya - Tentang Progress Pembangunan Rumah Sakit Baru serta Penunjang Lainnya. - Tentang Asrama Tapin di Banjarmasin	
102.	Senin 01 Ags 2022 Jam 20.15 s/d 23.35 wita	Ekpose PT Bastari Maju Tapin (Perseroda) Tentang Rencana Anggaran Bisnis (RAB), Terkait dengan Perencanaan Jaringan Perpipaan	
103.	Rabu 03 Ags 2022 Jam 20.15 s/d 23.30 Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
104.	Sabtu Malam 06 Agust / Minggu Malam 07 Agustus 2022	Talk Show Tapin Tv	
105.	Kamis 11 Ags 2022 Jam 09.00 s/d 12.30 wita	Rapat Kerja Tentang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Operasional RSUD Datu Sanggul / BLUD	
106.	Kamis 11 Ags 2022 Jam 13.30 s/d 16.00 wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Keolahragaan	
107.	Senin 15 Ags 2022 Jam 14.00 s/d 16.00 wita	Rapat Koordinasi Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe	
108.	Selasa 16 Ags 2022 Jam 13.30	Rapat Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA 2022	
109.	Kamis 18 Ags 2022 Jam 20.15 s/d 23.45 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Ke Bank Kalsel	
110.	Jum'at 19 Ags 2022 Jam 14.30 s/d 17.00	Ekpose Bank Kalsel tentang Pemenuhan Modal Inti dan Penyertaan modal	
111.	Jum'at 19 Ags 2022 Jam 20.15 s/d 23.45 Wita	Rapat Pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Ke Bank Kalsel	
112.	Sabtu Malam 20 Agust / Minggu Malam 21 Agustus 2022	Talk Show Tapin Tv	
113.	Rabu 24 Agustus 2022 Jam 15.30 s/d 17.00 Wita	RDPU Tentang Kebun Plasma Perkebunan Sawit	
114.	Kamis, 01 sept 2022 Jam 13.30 s/d 16.00 Wita	Rapat Bannus Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan September 2022	
115.	Rabu ,07 sept 2022 Jam 20.15 s/d 23.45 Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
116.	Sabtu, 10 sept 2022 Jam 16.00 s/d 18.00 Wita	Talk Show Tapin TV	
117.	Kamis, 15 sept 2022 Jam 13.30 s/d 16.00 Wita	Rapat Koordinasi Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe	
118.	Senin, 19 sept 2022 Jam 13.30 s/d Selesai	Rapat Internal DPRD dan Sekretariat DPRD Berkaitan Tentang Progress Kegiatan di Sekretariat DPRD	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
119.	Selasa,20 sept 2022 Jam 10.00 s/d 12.00 Wita	Rapat Paripurna Intern Penetapan Usul Calon Pengganti Pimpinan DPRD Dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
120.	Selasa,20 sept 2022 Jam 13.00 s/d 15.00 Wita	Rapat Banmus Penyusunan Jadwal Lanjutan Kegiatan Bulan September 2022	
121.	Rabu,21 sept 2022 Jam 10.00 s/d 13.00Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
122.	Selasa,27 Sept 2022 Jam 10.00 s/d 13.00Wita	RDP Tentang Realisasi Tanah untuk Gedung KIR	
123.	Kamis,29 sept 2022 Jam 10.00 s/d 13.00Wita	RDP Tentang Rencana Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Linmas	
124.	Kamis,29 sept 2022 Jam 10.00 s/d 13.00Wita	RDPU Tentang Kebun Plasma Perkebunan Sawit	
125.	Selasa,04 Okt 2022 Jam 10.00 s/d 13.00Wita	RDP Tentang Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2022	
126.	Kamis,06 Okt 2022 Jam 10.00 s/d 12.00Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
127.	Senin,10 Okt 2022 Jam 10.00 s/d 12.00Wita	Rapat Pembahasan TentaSng Ranperda Kepemudaan	
128.	Senin,10 Okt 2022 Jam 13.30 s/d 16.00Wita	Rapat Banmus Penyusunan Jadwal Lanjutan Kegiatan Bulan Oktober 2022	
129.	Selasa,11 Okt 2022 Jam 09.30 s/d 12.30Wita	Rapat Pembahasa Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Kalsel	
130.	Selasa,11 Okt 2022 Jam 13.00 s/d 16.30Wita	Rapat Pembahasa Tentang Ranperda Kepemudaan	
131.	Rabu,12 Okt 2022 Jam 09.30 s/d 12.30Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Kalsel	
132.	Rabu,12 Okt 2022 Jam 09.30 s/d 12.30Wita	RDP Tentang Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa	
133.	Senin,17 Okt 2022 Jam 11.00 s/d 14.30 Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
134.	Jum'at, 21 Okt 2022 Jam 14.30 s/d 16.30 Wita	RDPU Tentang Koperasi Plasma dan Kebun Plasma Perkebunan Sawit	
135.	Selasa,25 Okt 2022 Jam 10.00 s/d 12.30Wita	Rakor Tentang Hasil Tinjauan Lapangan ke Lokasi Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe	
136.	Selasa,25 Okt 2022 Jam 14.30 s/d 17.30Wita	Paripurna I.Penyampaian : 2. Ranperda dari Pemkab (RTRW) 2. Ranperda Inisiatif II.Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap :	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
		3. Ranperda dari Pemkab (RTRW) 4. Ranperda Inisiatif III.Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap: Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepada Bank Kalsel	
137.	Senin,31 Okt 2022 Jam 10.00 s/d 12.30Wita	Paripurna I.Penyampaian : 4. Ranperda APBD TA 2023 5. Ranperda dari Pemkab 6. Ranperda Inisiatif II.Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap : 4. Ranperda APBD TA 2023 5. Ranperda dari Pemkab 6. Ranperda Inisiatif	
138.	Senin,31 Okt 2022 Jam 13.30 s/d 15.00Wita	Rapat Banmas Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan November 2022	
139.	Senin,31 Okt 2022 Jam 20.15 s/d 23.45 Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
140.	Selasa,01 Nov 2022 Jam 09.30 s/d 12.30Wita	Rapat Pembahasan Tentang Realisasi Pendapatan TA 2022, Proyeksi Pendapatan TA 2023 (Serta Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	
141.	Selasa,01 Nov 2022 Jam 13.30 s/d 16.30Wita	RDPU Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe	
142.	Selasa,01 Nov 2022 Jam 20.15 s/d 23.30Wita	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
143.	Rabu,02 Nov 2022 Jam 09.30 s/d 12.30Wita	RDPU Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe	
144.	Rabu,02 Nov 2022 Jam 13.30 s/d 16.30Wita	RDPU Tentang Koperasi Plasma dan Kebun Plasma Perkebunan Sawit	
145.	Rabu,02 Nov 2022 Jam 13.30 s/d 16.30Wita	RDP Tentang Mobil Operasional Sekretariat dan Dengar Pendapat Masalah Biaya BBM Perjalanan Dinas (Tinjauan Revisi Perbub No 1 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas)	
146.	Senin,07 Nov 2022 Jam 09.30 s/d 13.30	RDPU Dampak Aktivitas Penimbunan PT. KAMI Desa Bitahan Baru Lokpaikat	
147.	Senin,07 Nov 2022 Jam 14.30 s/d 16.30	Rapat Pembahasan Tentang Ranperda Kepemudaan	
148.	Selasa,08 Nov 2022 Jam 09.00 s/d 12.30Wita	Paripurna Istimewa Pemberhentian dan Pelantikan Pimpinan DPRD serta Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin (Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin dari Fraksi PKB)	
149.	Selasa,22 Nov 2022 Jam 14.00 s/d 16.30	RDPU Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe (MEDIASI II)	
150.	Senin,28 Nov 2022 Jam 10.00 s/d 12.00	Rapat Koordinasi Tentang Ranperda : 1. RTRW 2. LP2B 3. Pajak dan Retribusi Daerah 4. Bangunan Gedung	

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket
151.	Senin, 28 Nov 2022 Jam 13.30 s/d 16.00	RDPU Tentang PJK	
152.	Kamis ,01 Des 2022 Jam 09.30 s/d 12.30	Rapat Koordinasi Tentang Dampak Aktivitas Jalan Hauling PT AGM terhadap Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Mediasi I dan II	
153.	Kamis ,01 Des 2022 Jam 13.00 s/d 15.00	Rapat Bannus Penyusunan Jadwal Kegiatan Bulan Desember 2022	
154.	Jum'at, 02 Des 2022 Jam 14.30 s/d 16.30 Wita	Rapat Pembahasan Tentang Prioritas dan Kerjasama Ranperda dalam Propemperda Tahun 2023	
155.	Selasa, 06 Des 2022 Jam 14.30 s/d 16.30 Wita	RDP Tentang Perkebunan Sawit (Termasuk Kebun Inti, Kebun Plasma, Koperasi Plasma) serta Rencana Pembentukan Forum Sawit Peduli Tapin	
156.	Selasa, 06 Des 2022 Jam 14.00 s/d 16.00 Wita	RDP Tentang Kelanjutan atau Kepastian Ruas Pandahan - Margasari	
157.	Jum'at 9 Desember 2022 Jam 15.00 s/d selesai	Talk Show Tapin TV	
158.	Ahad 11 Desember 2022 Jam 15.00 s/d selesai	Talk Show Tapin TV	
159.	Selasa, 13 Des 2022 Jam 09.30 s/d 12.30 Wita	RDP Tentang Pengusulan Bantuan Rehab Rekonstruksi Pasca Bencana BNPB	
160.	Kamis, 15 Des 2022 Jam 13.30 s/d 16.30 Wita	RDP Tentang Penempatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	
161.	Jum'at 23 Desember 2022 Jam 15.00 s/d selesai	Talk Show Tapin TV	
162.	Senin 26 Des 2022 Jam 09.30 s/d 12.30	Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap 1. Ranperda Keolahragaan 2. Ranperda Kepemudaan	
163.	Senin 26 Des 2022 Jam 13.30 s/d 16.30	Rapat Pembahasan Tentang Prioritas dan Kerjasama Ranperda dalam Propemperda Tahun 2023	
164.	Kamis 29 Des 2022 Jam 09.00 s/d 10.00	RDP Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
165.	Kamis 29 Des 2022 Jam 11.00 s/d 12.30	RDP Tentang Evaluasi Kinerja	
166.	Kamis 29 Des 2022 Jam 13.00 s/d 15.30	Rapat Bannus Menyusun Jadwal Kegiatan Bulan Januari 2023	

Daftar Rapat (Tahun dan Periode)

Sedangkan untuk Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Rapat-rapat yang diakomodir adalah sebagai berikut:

NO	Nama Risalah	Judul Rapat
----	--------------	-------------

1	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab.Tapin TA.2023 Kamis, 17 Februari 2022	Rapat Paripurna Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab.Tapin TA.2023
2	Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampaian LKPJ Bupati Tapin Tahun 2021 Kamis, 31 Maret 2022	Rapat paripurna Tentang Penyampaian LKPJ Bupati Tapin Tahun 2021
3	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara pembahasan LKPJ Bupati Tapin Rabu, 20 April 2022	Rapat pembahasan LKPJ Bupati Tapin
4	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampaian Rekomendasi DPRD Kab.Tapin Terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun 2021 Kamis, 28 April 2022	Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Rekomendasi DPRD Kab.Tapin Terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun 2021
5	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2021 dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2021 Senin, 27 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna tentang Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2021 • Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2021
.6	Rapat Pembahasan Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2021 Selasa, 28 Juni 2022	Rapat Pembahasan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2021 antara Komisi I,II,III dengan Mitra Kerja Masing-Masing
.7	Rapat pembahasan DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2020 Rabu, 29 Juni 2022	Rapat pembahasan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab.Tapin TA 2021 Antara Banggar dengan TAPD
.8	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampain Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.tapin Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin Tahun Anggaran	Rapat Paripurna tentang Penyampain Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.tapin Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin TA.2021

	2021	
	Kamis, 30 Juni 2022	
9	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Tentang Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran (PPAS) TA.2022	Pembahasan KUPA-PPAS TA.2022 Antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab. Tapin
	Rabu, 20 Juli 2022	
10	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Tentang Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran (PPAS) TA.2022	Pembahasan KUPA-PPAS TA.2022 Antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab. Tapin
	Kamis, 21 Juli 2022	
11	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUPA-PPAS TA.2022	Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUPA-PPAS TA.2022
	Senin, 25 Juli 2022	
12	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin Penyampaian Ranperda APBD Perubahan TA.2022 dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin Penyampaian Ranperda APBD Perubahan TA.2022 • Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2022
	Senin, 15 Agustus 2022	
13	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA.2022	Rapat Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA.2022 antara Komisi I,II,II dengan Mitra Kerja Masing-Masing
	Selasa, 16 Agustus 2022	
14	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA.2022 antara Komisi I,II,II dengan Mitra Kerja Masing-Masing • Rapat Pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA.2022 antara Banggar DPRD Kab.Tapin dengan TAPD Kab.Tapin
	Kamis, 18 Agustus 2022	
15	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2022 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda APBD Perubahan TA.2022	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2022 • Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda APBD Perubahan TA.2022
	Kamis, 25 Agustus 2022	
16	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2022

- | | | |
|----|---|--|
| | <p>Acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan TA.2022 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda APBD Perubahan TA.2022
Kamis, 01 September 2022</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda APBD Perubahan TA.2022 |
| 17 | <p>Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2023
Selasa, 02 Agustus 2022</p> | <p>Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2023 Antara Banggar dengan TAPD</p> |
| 18 | <p>Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2023
Kamis, 25 Agustus 2022</p> | <p>Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2023 Antara Komisi I,II,III dengan Mitra Kerja masing-masing</p> |
| 19 | <p>Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2023
Kamis, 08 September 2022</p> | <p>Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2023 Antara Komisi I,II,III dengan Mitra Kerja masing-masing</p> |
| 20 | <p>Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2023
Kamis, 15 September 2022</p> | <p>Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2023 Antara Banggar dengan TAPD</p> |
| 21 | <p>Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin TA.2023
Senin, 19 September 2022</p> | <p>Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin TA.2023</p> |
| 22 | <p>Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Penyampaian Rancangan Peraturan daerah Kab.Tapin Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kab.tapin Tahun 2023
Dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin Tahun 2023
Senin, 31 Oktober 2022</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan daerah Kab.Tapin Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Tapin tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kab tapin TA 2023 • Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Tapin terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Tapin TA.2023 |
| 23 | <p>Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan</p> | <p>Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2023 Antara Banggar dengan TAPD Kab.Tapin</p> |

	Belanja Daerah TA.2023	
	Senin, 14 Nopember 2022	
24	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2023	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2023 Antara Banggar dengan TAPD Kab.Tapin
	Selasa, 15 Nopember 2022	
25	Rapat DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2023	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2023 Banggar dengan TAPD Kab.Tapin
	Jumat, 25 Nopember 2022	
26	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin dengan Acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2023 dan Pendatangan Nota persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2022	Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2023
	Senin, 28 Nopember 2022	

Sumber: Laporan Jember dan Penganggaran oleh PIRIPURNA

Berdasarkan data tersebut diatas pada Rapat Akhir Monitoring dan Evaluasi Sekretariat DPRD disimpulkan bahwa Seluruh Risalah Rapat-rapat DPRD dapat diselesaikan tepat waktu. Sehingga Untuk Indikator Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 90% dengan capaian 111% didapat dari rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Risalah Rapat Dewan Yang Terselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Risalah Rapat Yang Harus Dibuat}} = 100\%$$

$$\frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

Untuk indikator Persentase Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu, adapun program dan kegiatan yang menunjang indikator tersebut adalah sbb:

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota	656.187.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	190.500.000
Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	37.275.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	20.775.000
Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	35.900.000
Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	35.900.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	60.650.000
Peningkatan Kapasitas DPRD		465.687.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	465.687.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65 %	100 %	153 %

- Persentase aspirasi masyarakat yang terkomodir
Untuk indicator Persentase aspirasi masyarakat yang terkomodir terealisasi sebesar 90 % dari target 65 % dengan capaian tahun 2022 100 % didapat dari rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Aspirasi Yang Terakomodir}}{\text{Jumlah Aspirasi Yang Masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{9}{10} \times 100\% = 90 \%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Persentase aspirasi masyarakat yang terkomodir Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2022 diperoleh dari aspirasi yang disampaikan masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) aspirasi yang yang semua diselesaikan dengan dialog/audensi. Hanya satu yg belum diselesaikan yaitu aspirasi berkenaan denaerkebunan sawit, Secara keseluruhan semua aspirasi tersebut didahului dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.

Aspirasi masyarakat terhadap pelayanan semakin tinggi dan kompetitif seiring dengan dinamika politik di masyarakat membuat masyarakat semakin sadar dan paham akan haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang tugas dan wewenang DPRD. Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi/tuntutan diterima dan disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin kepada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tapin dalam hal ini Komisi yang membidangnya sesuai dengan tuntutan masyarakat atau organisasi masyarakat. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin atas saran dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin.

Dialog/audensi dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat atau organisasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tapin. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis dialog/audensi diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin atas saran dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin. Adakalanya dialog/audensi dilaksanakan secara langsung pada saat penyampaian aspirasi melalui demo/unjuk rasa dikarenakan permintaan massa atau organisasi masyarakat, Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin atau Komisi yang dianggap perlu diadakan pembicaraan lebih lanjut untuk penjelasan atau penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Penyampaian aspirasi tertulis melalui surat yang ditujukan ke DPRD Kabupaten Tapin disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin selanjutnya didistribusikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin ke Komisi yang membidangnya berdasarkan disposisi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin. Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sebatas memfasilitasi setiap aspirasi/tuntutan yang masuk dan hanya memantau sejauh mana aspirasi/tuntutan tersebut ditindak lanjuti.

Aspirasi Masyarakat yang masuk dan difasilitasi Tahun 2022

No	Penyampai Aspirasi	Jenis Aspirasi Masyarakat	Fasilitasi Aspirasi Masyarakat	Keterangan
1.	Persatuan Pedagang Pasar Rantau	Audensi Perihal Ritribus Sewa Toko PASAR Rantau	Rapat dengan Mitra terkait	Terlaksana
2.	Pedagang Pasar Keraton	Perihal dengan Masalah Karcis pasar	Dirapatkan dengan mitra komisi dan perwakilan pedagang pasar keraton	Terlaksana
3.	Aspirasi para Sopir angkutan Batu Bara	Perihal Kelangkaan BBM Jenis Solar di SPBU	RDPU dengan Pengelola SPBU dan Perwakilan Sopir Batu bara.	Terlaksana
4.	Aspirasi Karyawan tentang Kebijakan PT KAP dan KIU	Audinse dengan pimpinan PT KAP Dan PT KIU	Dimidiasi oleh Komisi terkait Jenis Kebijakan yang dijalankan kepada Karyawan oleh PT.KAP dan KIU	Terlaksana
5.	Keluhan Masyarakat Desa Sa abaris dan Desa Pantai Cabe .	Tentang dampak aktivitas jalan Hauling PT AGM	RDPU dengan Pimpinan PT AGM	Terlaksana
6.	Pengelola Tempat Hiburan di Tapin	Audensi tentang Operasional tempat Hiburan malam dikabupaten Tapin	Rapat dengat pendapar dengan Komisi terkait .	Terlaksana
7.	Yayasan Blik Budaya	Tentang bantuan fasilitas kepada Pemkab dan Pengprov terhadap keberadaan di Kab.tapin	RDP dengan Mitra terkait dengan komisi.	Terlaksana
8.	Koperasi Plasma Sawit	Tentang kebun Plasma Perkebunan sawit di kab.Tapin	RDPU dengan Perkebunan Sawit Inti	Terlaksana
9.	Aspirasi Masyarakat Desa Bitatan Baru Lokpakat .	Tentang Dampak Aktivitas Penimbunan PT KAMI.	RDPU dengan Perwakilan PT.KAMI dan perwakilan Masyarakat	Terlaksana
10.	Perkebunan Sawit inti, plasma, dan Koperasi .	Tentang pembentukan Forum	RDP. Bersama Komisi terkait dengan perwakilan.	Belum terlaksana

Sumber: Laporan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100 %	100 %

- Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD

Indikator Kinerja Persentase raperda yang tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100% Persentase tersebut didapatkan dari rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pokok pikiran DPRD Yang dinyatakan Selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Pokok pikiran yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga untuk capaian Kinerjanya didapat dari rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Aspirasi yang disampaikan dalam Reses, dicatat, didiskusikan dalam forum konsultasi publik, kemudian hasilnya dirangkum dalam bentuk Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapin yang akan disampaikan dalam pembahasan penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin. Tidak semua pokok-pokok pikiran tersebut dapat terealisasi dalam bentuk anggaran kegiatan.

Dalam perumusan rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil Reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planing* (SIPD), yang selanjutnya dikaji dalam suatu mekanisme perencanaan. Proses kajian tersebut meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi permasalahan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan dikelompokkan ke dalam program/kegiatan sesuai dengan perangkat daerah terkait,
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut,
3. Analisis kesesuaian indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan,
4. Pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari perangkat daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas, dan
5. Perumusan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

Kajian terhadap pokok pikiran ini diperlukan untuk mendapatkan pokok pikiran yang selaras dengan RPJMD, berikut Pokok Pikiran DPRD yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 dan keselarasannya dengan RPJMD.

Pokok Pokok Pikiran DPRD	Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Selaras dengan RPJMD	Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Selaras Masuk dalam APBD TA. 2022
200	200	200

POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNI T/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
1.	Lanjutan Pembuatan Saluran Sungai Matarau Sawah Saro RW.03 Kel. Rangda Malingkung Kec.Tapin Utara.	1 PAKET	Tapin Utara	DINAS PUPR (SDA)	Dapil 1
2.	Pembuatan Drainase Jalamn tembus Sapang Kel.Kupang RT 10 RW 03 Kec Tapin Utara	1 PAKET	Tapin Utara	DINAS PUPR (BM)	Dapil 1
3.	Peninggian Jalan Cor Beton Desa Perintis raya RT 03,RW02 Kec.Tapin Utara	1 PAKET	Tapin Utara	DINAS PUPR (BM)	Dapil 1
4.	Pengaspalan Pasir Goreng (Latasir) Jalan AMD Desa BINDERANG RT.06 Kec Lokpaikat	1 PAKET	Lokpaikat	DINAS PUPR (BM)	Dapil 1
5.	Rehab Ruang kelas SDN. Rantau Kanan 1Jln. Darussalam	1 PAKET	Tapin Utara	Dinas Pendidikan	Dapil 1
6.	Pembangunan Ruang kelas dan Pagar TK Tri Sula Jln, gerilya	1 PAKET	Tapin Utara	Dinas Pendidikan	Dapil 1
7.	Pembuatan Jalan Tani Padang tembusa Baruh Kapar Desa banua Hanyar Kec. Tapin Utara	1 PAKET	Tapin Utara	Dinas Pertanian	Dapil 1
8.	Pembuatan Tabat Sungai Maliau RT 03 RW 01 Desa Lokpaikat	1 PAKET	Lokpaikat	Dinas Pertanian	Dapil 1

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
9.	Cor Semen Bahu jalan 1 Meter Kiri dan Kanan RT 05, RW 02 Kelurahan Raya Belanti Kec.Binuang	1 Paket	Binuang	DPU –PR (BM)	Dapil 2
10.	Cor Semen Bahu jalan 1 Meter Kiri dan Kanan RT 07, RW 02 Kelurahan Raya Belanti Kec.Binuang	1 Paket	Binuang	DINAS PUPR (BM)	Dapil 2
11.	Pembuatan Siring Jalan Teluk Kaluang RT, 10 RW, 04 Kelurahan Raya Belanti	1 Paket	Binuang	DPU – PR (BM)	Dapil 2
12.	Pengurukan Halaman Belakang Madrasah Abdan Syakura RT.05 RW.06, Kel. Raya Belanti	1 Paket	Binuang	DPU – PR (CK)	Dapil 2
13.	Pembuatan Tempat Wudhu dan WC (TOILET) Majelis Ta'lim Tabu Darat ARRAHMAN , kel Raya Belanti	1 Paket	Binuang	DPU – PR (CK)	Dapil 2
14.	Pembuatan Sumur BOR Dalam Pesantren Putri Siti Khadijah Desa pematang Karang RT.005,RW 002 Kec.Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	DPU – PR (CK)	Dapil 3
15.	Pembuatan Pagar dan Urugkan Alkah Muslimin Sungai Kandang, Desa Sungai Rutas Kec. Candi laras	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU – PR (CK)	Dapil 3

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNI T/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
16.	Rehab. Sungai Pasiban Serta Ray Desa SEL. Rutas RT.002, Kec. Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU – PR (SDA)	Dapil 3
17.	Rehab Sungai Bakulapai serta Ray Desa SEL> Rutas RT.002, Kec. Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU – PR (SDA)	Dapil 3
18.	Pembangunan Pagar Beton SDN Pematang Karang Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	Dinas Pendidikan	
19.	Pembangunan Pagar Beton SDN Hiyung 1 Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	Dinas Pendidikan	Dapil 3
20.	Peningkatan COR Paving Jalan Tani ,Desa Pematang Karang RT,01, Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	Dinas Pertanian	Dapil 3
21.	Paving Blok Jalan Raya Barat RT.02, RW 01, Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
22.	Paving Blok Jalan Raya Barat RT. 03 RW. 01 Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
23.	Pembangunan Gedung Pemuda dan Olahraga Sport Center Table Tennis H.Adi Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang	1 Paket	Binuang	DPU-PR (CK)	Dapil 2

24.	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD) PualamSari 1	1 Paket	Binuang	Dinas Pendidikan	Dapil 2
No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
25.	Pembangunan Pengaman Tebing Desa Parigi Kacil RT. 01 S/D RT.02 RW. 02 Kecamatan Bakarangan	1 Paket	Bakarangan	DPU-PR (SDA)	Dapil 3
26.	Pembuatan Druinase Desa Parigi Kacil RT.03 S/D RT.04 RW.02 Kecamatan Bakarangan	1 Paket	Bakarangan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
27.	Pengaspalan Jalan Datu Panjang Desa Parigi Kacil RT.02 RW.01 Kec. Bakarangan	1 Paket	Bakarangan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
28.	Pembuatan Tabat Sungai Pambalokan Muka RT.03 Desa Hiyung Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	DPU-PR (SDA)	Dapil 3
29.	Pembuatan Siring Pengaman Tebing Desa Pandahan RT. 06 Ke. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	DPU-PR (SDA)	
30.	Pembuatan Siring Jalan Desa Pandahan RT.07 Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	DPU-PR (SDA)	
31.	Pagar Sekolah SD Negeri Pandahan 1 Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	Dinas Pendidikan	Dapil 3
32.	Pagar Sekolah SD Negeri Pandahan 2 Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	Dinas Pendidikan	Dapil 3
33.	Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa	1 Paket	Tapin Tengah	Dinas Pertanian	Dapil 3

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
	Hiyung RT.03 RW.02 Kec. Tapin Tengah				
34.	Pembuatan Jalan Tari Rabat Beton RT.03 RW.02 Desa Asam Randah Kec. Hatungun Panjang 200M Lebar 2,5 M Tebal 15 CM	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (BM)	Dapil 2
35.	Pembuatan Rabat Beton Jl. Pahiwin RT.04 RW.02 Tarungin, Panjang 250M Lebar 2M Tebal 15	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (BM)	Dapil 2
36.	Pembuatan Rabat Beton Jalan Desa Bagak Kec. Hatungun, Panjang 500M Lebar 2M Tebal 20cm	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (BM)	Dapil 2
37.	Pemasangan Paving Block Halaman SDN 2 Hatungun	1 Paket	Hatungun	Dinas Pendidikan	Dapil 2
38.	Pembuatan Pagar SDN 2 Hatungun	1 Paket	Hatungun	Dinas Pendidikan	Dapil 2
39.	Pembuatan Paving Block Halaman SDN 1 Tarungin	1 Paket	Hatungun	Dinas Pendidikan	Dapil 2
40.	Pembuatan Pagar SDN 1 Tarungin	1 Paket	Hatungun	Dinas Pendidikan	Dapil 2
41.	Pembuatan Drainase Dan Siring Jalan Ruas Matang Batas RT.02 RW. 01	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (BM)	Dapil 2
42.	Pemasangan Paving Block Halaman Puskesmas Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	DPU-PR (BM)	Dapil 1
43.	Pengaspalan Jalan Desa RT.03 Desa Budi Mulya Kec.	1 Paket	Lokpaikat	DPU-PR (BM)	Dapil 1

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
44.	Pengaspalan Jalan Desa RT.04 – RT. 05 Desa Budi Mulya Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	DPU-PR (BM)	Dapil 1
45.	Rehab Pagar, Pintu Gerbang Dan Plank Sekolah SDN Rangda Malingkung 3 Kec. Tapin Utara	1 Paket	Tapin Utara	Dinas Pendidikan	Dapil 1
46.	Rehab Pagar SDN Bitahan Baru Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	Dinas Pendidikan	Dapil 1
47.	Rehab Pagar SDN Lokpaikat 3 Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	Dinas Pendidikan	Dapil 1
48.	Pembangunan Ruang UKS SDN Lokpaikat 1 Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	Dinas Pendidikan	Dapil 1
49.	Pembangunan WC murid dan Pengecatan Bangunan Sekolah SDN Lokpaikat Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	Dinas Pendidikan	Dapil 1
50.	Pengaspalan Jalan RT. 04 RW.02 Kelurahan Bitahan Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	DPU-PR (BM)	Dapil 1
51.	Pembuatan Drainase Desa Timbaan RT.02 RW.02 Kecamatan Tapin Selatan Panjang 300M	1 Paket	Tapin Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 2
52.	Pengaspalan Latasir Jalan Lingkungan Padat Karya Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan lebar 3M Panjang 400M	1 Paket	Tapin Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 2
53.	Pengaspalan Jalan Desa Tatakan Jalan Datu Ganun	1 Paket	Tapin Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 2

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNI T/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
54.	Normalisasi Sungai Haur dan Sungai Labuhan	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR (SDA)	Dapil 1
55.	Normalisasi Sungai Ray I Ray II dan Sungai Paku	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR (SDA)	Dapil 1
56.	Normalisasi Sungai Balimau	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR (SDA)	Dapil 1
57.	Normalisasi Sungai Pikut	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR (SDA)	Dapil 1
58.	Normalisasi Sungai Hanyar	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR (SDA)	Dapil 1
59.	Normalisasi Sungai Maratau	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR (SDA)	Dapil 1
60.	Normalisasi Sungai Batang Leang dan Sungai Hapai	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
61.	Normalisasi Sungai Kundur dan Sungai Pandan Desa Bagak Hatungun	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
62.	Normalisasi Sungai Pasudaan Desa Burakai Kec. Hatungun	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
63.	Pengaspalan Jalan (Macadam Latahir) RT.06 Desa Pualam Sari Kec. Binuang	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
64.	Pengaspalan Jalan (Macadam Latahir) RT.07 Desa Pualam Sari Kec. Binuang	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
65.	Uruk Jalan Dengan Base Course Dicempaka RT.05 Kelurahan Raya Belanti	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
66.	Pembangunan Siring	1 Paket	Binuang	DPU-PR	Dapil 2

	Badan jalan di Cempaka Ray 5 RW. 05 Kel. Raya Belanti			(BM)	
No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
67.	Pembanguna Jalan Ulin di Cempaka Ray 2 RT.012 RW. 005	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
68.	Pembuatan Drainase Jl. Sidorejo RT.06 Kel. Karang Putih (Lanjutan Tahap II)	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
69.	Pembuatan Drainase Jl. Sidorejo RT.10 Kel. Karang Putih (Lanjutan Tahap II)	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
70.	Pembuatan Drainase Jl. Sidorejo RT.11 Kel. Karang Putih	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
71.	Pengaspalan Jl. Latisis Jl. Batu Belah Desa Matang Batas	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (BM)	Dapil 2
72.	Pengaspalan Jl. Latisis Desa Hatungun Kec. Hatungun RT.06 RW.03	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (BM)	Dapil 2
73.	Rehab Gedung SDN Rawana Hulu	1 Paket	Candi Laras Utara	Dinas Pendidikan	Dapil 3
74.	Pembangunan Kantor SDN Rawana Hulu	1 Paket	Candi Laras Utara	Dinas Pendidikan	Dapil 3
75.	Rehab Atap dan Plafon dan WC / Tempat Wudhu Gedung Sekolah SDN Bakarangan I	1 Paket	Bakarangan	Dinas Pendidikan	Dapil 3
76.	Bantuan Rehap Pagar Gedung Sekolah SDN Bakarangan I	1 Paket	Bakarangan	Dinas Pendidikan	Dapil 3
77.	Bantuan Bangnan Mushola Sekolah SDN	1 Paket	Bakarangan	Dinas Pendidikan	Dapil 3

	Bakarangan 1				
78.	Permohonan Bantuan Rehap SDN Waringin Dalam	1 Paket	Bakarangan	Dinas Pendidikan	Dapil 3
No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
79.	Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Desa Sungai Puting RT.01 RW.04	1 Paket	Candi Laras Utara	DPU-PR (BM)	Dapil 3
80.	Lanjutan Pembuatan Drainase dan Culvert Desa Harapan Masa Kec. Tapin Selatan	1 Paket	Tapin Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 2
81.	Pengaspalan Macadam Jalan Desa Sawang RT.10 Kec. Tapin Selatan	1 Paket	Tapin Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 2
82.	Lanjutan Pengaman Tebing Checkdam nes 88 Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
83.	Pengaspalan Jalan RW.03 Dan RW.04 Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR (BM)	Dapil 2
84.	Lanjutan Pengaman Tebing RW.01 Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
85.	Pengaman Tebing, Desa Suato Baru Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
86.	Lanjutan Pembuatan Drainase Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR (BM)	Dapil 2
87.	Lanjutan Pembuatan	1 Paket	Kec. Salam	DPU-PR	Dapil 2

	Drainase dan Culvert Jalan Poros Desa Kambang Habang Lama – Batu Hapu, Kecamatan Salam Babaris		Babaris	(BM)	
No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
88.	Lanjutan Pengaspalan Jalan Dresas Kambang Habang Baru RW.04 RT.07 Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR (BM)	Dapil 2
89.	Lanjutan Pengaspalan Jalan Dresas Kambang Habang Baru RW.04 RT.08 Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR (BM)	Dapil 2
90.	Pembangunan Jembatan RW. 03 Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR (BM)	Dapil 2
91.	Pembanguna Drainase Jalan Saka Permai RT.002 RW.001 Desa Tungkap	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
92.	Pengaspalan Jalan Irigasi RT.004 RW.002 Desa Tungkap	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
93.	Perkerasan Jalan Irigasi RT. 006 RW. 003 Desa Tungkap	1 Paket	Binuang	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
94.	Pembangunan Drainase Jalan Telaga Ara RT.004 RW.002 Desa Tungkap 1000M	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
95.	Pembangnan Jembatan Jalan Tinggiran RT.02 RW.01 Desa Gunung Batu	1 Paket	Binuang	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
96.	Peningkatan Jalan Mutiara (pengaspalan)	1 Paket	Binuang	DPU-PR (SDA)	Dapil 2

	RT.003 RW.001 Desa Tungkup				
97.	Peningkatan Jalan Sarang Semut RT.08 RW.03 Desa Tungkup	1 Paket	Binuang	DPU-PR (BM)	Dapil 2
No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
98.	Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Salam Babaris RT.05 (Jalan Masuk Gereja) Tembus Desa Pantai Cabe Muka Mesjid Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR	Dapil 2
99.	Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Salam Babaris RT.02 Muka Puskesmas Tembus Desa Pantai Cabe RT.12 Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR	Dapil 2
100.	Pengaspalan Hotmix Jalan Samping Mesjid Pasar Desa Salam Babaris RT.01 Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR	Dapil 2
101.	Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Salam Baharis RT.03 Tembus Desa Pantai Cabe RT.13 Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR	Dapil 2
102.	Pengaspalan Hotmix Jalan Samping Polsek Salam Babaris sampai Sumpang Jalan Houling	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR	Dapil 2

No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNI T/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
103.	Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Pantai Cabe RT.09 Menuju RT.10 Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris	1 Paket	Kec. Salam Babaris	DPU-PR	Dapil 2
104.	Pembuatan Pagar SDN Shabah RT.02 RW.01 Desa Shabah Jalan Sido Dadi	1 Paket	Kec. Bungur	Dinas Pendidikan	Dapil 1
105.	Lanjutan pengaspalan Makadam Jalan Sara Desa Labuhan Tembus Bitahan Baru Keluarahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara	1 Paket	Kecamatan Tapin Utara	DPU-PR	Dapil 1
106.	Peningkatan Pengaspalan Makadam Jalan Pertanian RT.04 RW.03 Tembus RT.06 RW.04 Desa Shabah Jalan Sidodadi Kecamatan Bungur	1 Paket	Bungur	DPU-PR	Dapil 1
107.	Lanjutan Pembuatan Drainase Jalan Labuhan RT.08 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR	Dapil 1
108.	Pembuatan Jembatan Box Culvert Sungai Asam Kelurahan Rangda	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR	Dapil 1

	Malingkung Tahap 2				
109.	Pembuatan Drainase Desa Ayunan Papan RT. 01 Blok A Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	DPU-PR	Dapil 1
No	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
110.	Pembuatan Drainase Desa Ayunan Papan RT. 03 Blok B Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	DPU-PR	Dapil 1
111.	Pembuatan Drainase Desa Ayunan Papan RT. 04 Blok D Kec. Lokpaikat	1 Paket	Lokpaikat	DPU-PR	Dapil 1
112.	Lanjutan Pembuatan Drainase Jalan Kalakasirang RT.12 Kel. Kupang	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR	Dapil 1
113	Penataan Halaman dan Pagar Kuburan Muslimin Al Mu'in Desa Banua Hanyar Kec. Tapain Utara	1 Paket	Tapin Utara	DPU-PR	Dapil 1
114	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Angah Kel Kupang		Tapin Utara	DPU-PR	Dapil 1
115	Pembangunan Pagar SDN. Hatungun , Jalan Raya Timur RT,01.RW01		Hatungun	Dinas Pendidikan	Dapil 2
116	Pembangunan PUSKESDES Jln SMA Negeri 1 Binuang RT 003,RW 002 Kel.Karangan Putih		Binuang	Dinas Kesehatan	Dapil 2
117	Peningkatan Jalan Adi Pati Pulau Luluk, Kel. Binuang		Binuang	DPU- PR	Dapil 2

NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
118	Pengaspalan Jalan dan Lanjutan Siring Jalan Tembus Balai Benih , Jalan SPMN 1 Binuang RT.05 dan RT 16B ,Kel.Binuang	1 Paket	Binuang	DPU-PR	Dapil 2
119	Normalisasi Sungai Batang Leang dan Sungai Hapai	1 Paket	Hatungun	DPU-PR (SDA)	Dapil 2
120	Rabat Beton Komplek Cendrawasih Jalan Serawi Tengah RT.016 B, RW.006 Kec. Binuang	1 Paket	Binuang	DPU-PR	Dapil 2
121	Pemasangan Paving Beton Jalan Tani RT.08Sido Rejo Kel.Karangan Putih, Kec.Binuang	1 Paket	Binuang	DPU-PR	Dapil 2
122	Pembuatan Siring/Tapir Draenasi Jalan Suka Maju , Kel.Karangan Putih	1 Paket	Binuang	DPU-PR	Dapil 2
123	Pengerasan Jalan Usaha Tani , jalan Serawi Tengah RT05 dan RT.16 B , Kec. Binuang	1 Paket	Binuang	Dinas Pertanian	Dapil 2
124	Pembuatan Draenasi Depan Kubur Muslimin, Desa Bakarangan, RT 01	1 Paket	Bakarangan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
125	Pembuatan Pondasi Jalan Baru RT.01, Desa Batang lantik Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	DPU-PR (BM)	Dapil 3
		TARGET / VOLUME	KECAMATAN	SOPD	KETERANGAN

NO	KEGIATAN	(M/KM/UNIT/BUAH)		TUJUAN	
126	Pengaspalan Jalan Depan Kantor Camat Bakarangan Tembus Kulihi,RT 05 Desa Bakarangan.	1 Paket	Bakarangan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
127	Pembuatan Jalan Lingkungan/Pemukiman , RT.02 Desa Sungai Rutas Hulu , Kec.Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU-PR (BM)	Lanjutan Dapil 3
128	Pembuatan Jalan Lingkungan/Pemukiman RT.04 Desa Sungai Rutas Hulu ,Kec. Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU-PR (BM)	Lanjutan Dapil 3
129	Pembuatan Jembatan Ulin Lingkungan/Pemukiman , RT 04 Desa Sungai Rutas Hulu,Kec.Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
130	Pengaspalan Jalan RT.01,RW02 Desa Sungai Rutas Hulu , Kec. Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
131	Pengaspalan Jalan RT.04,RW02 Desa Sungai Rutas Hulu , Kec. Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
132	Pembangunan/Pembuatan Rehab.Jembatan Cor Beton Depan Rumah Hj.Anyang, RT.02 Desa Pematang Karang Kec.Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	DPU-PR (BM)	Dapil 3
NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN

NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
133	Pembangunan Siring Jalan RT.02 ,Desa Margasari Hulu, Kec. Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
134	Pembuatan Jalan Lingkungan Depan Makam Datu Yamani Hujjail,RT.001, Desa Baringin, Kec.Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
135	Pengaspalan Jalan Lingkungan Samping Rumah Ikul tembus Bakarangan RT.02 Desa Batang Lantik, Kec. Tapin Tengah	1 Paket	Tapin Tengah	DPU-PR (BM)	Dapil 3
136	Pembangunan / Pembuatan Pagar POSYANDU, RT02, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan	1 Paket	Bakarangan	DPU-PR (CK)	Dapil 3
137	Pembuatan Jalan Tani Samping Sarang Walit UMMI Syarifah, RT.01, Desa Bakarangan, Kec.Bakarangan	1 Paket	Bakarangan	Dinas Pertanian	Dapil 3
138	Pembuatan Jalan Tani Samping Sawah Nasar, RT.08, Desa Sungai Rutas, Kec.Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	Dinas Pertanian	Dapil 3
139	Pembuatan Jalan Tani Cor Paving Samping Sawah Anang Ilmi, Desa Sungai Rutas, Kec.Candi Laras Selatan	1 Paket	Candi Laras Selatan	Dinas Pertanian	Dapil 3

140	Pembuatan DAM Irigasi, RT.006, Desa Pandulangan, Kec. Tapin Tengah		Tapin Tengah	Dinas Pertanian	Dapil 3
141	Pemasangan Saringan Halaman SDN.Baulin, RT 05, RW02, Kec.Candi Laras Selatan		Candi Laras Selatan	Dinas Pendidikan	Dapil 3
142	Penataan Halaman dan Pembuatan Pagar SDN, Pandulangan 2, Kecamatan Tapin Tengah		Tapin Tengah	Dinas Pendidikan	Dapil 3
143	Rehab Tabat Beton Sungai Matang Durian, Desa Sungai Bahalang RT.004, RW.002, Kec.Tapin Tengah		Tapin Tengah	DPU-PR	Dapil 3
144	Pembuatan Siring Jalan Pasangan Batu Desa Mandurian RT.01, Kec. Tapin Tengah		Tapin Tengah	DPU-PR	Dapil 3
145	Penataan Halaman dan Pagar Kuburan Muslimin Miftahul Jannah, Desa Mandurian Kec. Tapin Tengah		Tapin Tengah	DPU-PR	Dapil 3
146	Pembuatan Siring Sungai Pondok Desa Andhika, Kec.Tapin Tengah.		Tapin Tengah	DPU-PR	Dapil 3
147	Pembuatan Tersier Desa Andhika RT.03 Kecamatan Tapin Tengah.		Tapin Tengah	DPU-PR	Dapil 3
NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN

148	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Desa Parigi RT.01, RW .01 Kec.Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR	Dapil 3
149	Pembuatan Rabat Beton Jalan RT.05 dan Halaman POSKESDES Desa Kaladan, Kec.Candi Laras Utara		Candi Laras Utara	DPU-PR	Dapil 3
150	Pembuatan Drainase Jalan Desa Waringin RT.04.RW.02, Kec. Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR	Dapil 3
151	Pembuatan Jembatan Desa Pebuangan Hii RT.08, Kec. Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR	Dapil 3
152	Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Waringin R.04 , Kec.Bakarangan		Bakarangan	Dinas Pertanian	Dapil 3
153	Cor Beton Jalan Usaha Tani RT.004 Desa Banua Banua Halat Kiri , Kec. Tapin Utara		Tapin Utara	Dinas Pertanian	Dapil 1
154	Pembuatan Drainase Cor Beton RT.04, Desa Shabah, Kec.Bungur (Lanjutan Tahap IV))		Bungur	DPU – PR (BM)	Dapil 1
155	Pembuatan Drainase Cor Beton RT.09, Desa Shabah, Kec.Bungur		Bungur	DPU – PR (BM)	Dapil 1
NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN

156	Pembuatan Drainase Cor Beton RT.06, Desa Shabab, Kec.Bungur (Lanjutan Tahap III))		Bungur	DPU-PR (BM)	Dapil 1
157	Pembuatan Jalan Usaha Tani RT.02 dan RT 03 Desa Jingah Babaris Kec. Tapin Utara		Tapin Utara	Dinas Pertanian	Dapil 1
158	Pembuatan Jalan Usaha Tani RT.01 Desa Bungur Baru, Kec.Bungur		Bungur	Dinas Pertanian	Dapil 1
159	Pembuatan jalan usaha tani sungai Impat Desa Binderang,Kec. Lokpaikat		Lokpaikat	Dinas Pertanian	Dapil 1
160	Rehab Jalan Usaha Tani RT.02 Desa Barua Halat Kiri, Kec. Tapin Utara		Tapin Utara	Dinas Pertanian	Dapil 1
161	Peningkatan Jalan HOTMIX di RT.01,RT.3,RT10,RT.11, Desa A. Yani Pura , Kec.Binuang		Binuang	DPU-PR(BM)	
162	Pembangunan 3 buah Jembatan SLAB CULVERT desa Timbaan RT03, Kec. Tapin Selatan		Tapin Selatan	DPU-PR(BM)	
163	Pengaspalan MACADAM jalan Kabupaten Suoto Tatatakan – Rumuntin, Kec. Tapin Selatan		Tapin Selatan	DPU-PR(BM)	
NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN

164	Peningkatan Jalan HOTMIX Desa Kembang Kuning ruas Pantai Batu RT.06-05, Kec.Hatungun		Hatungun	DPU-PR(BM)	
165	Pengaspalan MACADAM Jalan Pasuda'an dan Jalan Ami-Ami Desa Burakai RT04 s/d RT 06 , Kec.Hatungun		Hatungun	DPU-PR(BM)	
166	Pembangunan Pagar SD> A.Yani Pura 1 Desa A.Yani Pura 1, Kec. Binuang (lanjutan)		Binuang	Dinas Pendidikan	
167	Pembuatan Pagar SDN Suato 1, Desa Suato Lama, Kec.Salam Babaris		Salam Babaris	Dinas Pendidikan	
168	Pembuatan Siring / Pondasi Jalan Batung RT.04 Desa Waringin		Bakarangan	DPU-PR (BM)	Dapil 3
169	Pembuatan Jalan Paving RT.003,RW.002 Desa Paul, Kec. Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR(BM)	Dapil 3
170	Pembuatan Jalan Cor Beton / Jalan Tani RT.003,RW.002, Desa Paul,Kec.Bakarangan		Bakarangan	Dinas Pertanian	Dapil 3
171	Rehab Total Jembatan BOX CULVERT RT.04, Desa Waringin, Kec.Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR(BM)	Dapil 3
172	Jembatan Jalan Tani – Jembatan Ulin RT.01,RW.1, Desa Gadung Karamat.		Bakarangan	Dinas Pertanian	Dapil 3
NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN

173	Jalan Tani – RT.01,RW.1, Desa Gadung Karamat, Kec. Bakarangan		Bakarangan	Dinas Pertanian	Dapil 3
174	Rehab dan Pengurugkan Lapangan Sepak Bola, Desa Parigi,Kec. Bakarangan		Bakarangan	DISPORA	Dapil 3
175	Pembuatan Siring Pengaman Tebing Sungai,RT.1 Desa Parigi Simbar, Kec.Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR(SDA)	Dapil 3
176	Jalan Tani RT.1, Desa Parigi Simbar, Kec. Bakarangan		Bakarangan	Dinas Pertanian	Dapil 3
177	Pembangunan Pengaman Tebing Sl.Asam, RT,08, Kel. Rangda Malingkung,Kec. Tapin Utara		Tapin Utara	DPU-PR(SDA)	Dapil 1
178	Pembangunan Siring Sungai Tapin, Desa Banua Halat Kiri, Kec.Tapin Utara		Tapin Utara	DPU-PR(SDA)	Dapil 1
179	Pembangunan Siring SEL.Tapin Desa Banua Halat Kiri		Tapin Utara	DPU-PR(SDA)	Dapil 1
180	Pengaspalan Jalan Sidodadi RT.05/04, Desa Sabah,Kec. Bungur		Bungur	DPU-PR(BM)	Dapil 1
181	Pembuatan Drainase Desa Ayunan PapanRT.01/01GG. Mufakat,Kec. Lokpaikat		Lokpaikat	DPUPR(BM)	Dapil 1
NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN

182	Pengaspalan MAKADAM Blok D RT.04.RW02, Desa Ayunan Papan, Kec.Lokpaikat		Lokpaikat	DPU-PR(BM)	Dapil 1
183	Pengaspalan Jalan GG.Mufakat Blok BRT.02/03, Desa Ayunan Papan, Kec.Lokpaikat		Lokpaikat	DPU-PR(BM)	Dapil 1
184	Pembuatan Pagar SDN Shabah, Kec. Bungur		Bungur	Dinas Pendidikan	Dapil 1
185	Pembuatan Pengaman Tebing/Siring Sungai Desa Sungai Bahalang, Kec. Tapin Tengah		Tapin Tengah	DPU-PR(SDA)	Dapil 3
186	Pembuatan Drainase Desa Pandulangan RT01/02, Kec. Tapin Tengah		Tapin Tengah	DPU-PR(BM)	Dapil 3
187	Pembuatan Jalan Menuju Makam Keramat desa Paul, Kec. Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR(CK)	Dapil 3
188	Pembuatan Drainase Desa Paul, Kec. Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR(BM)	Dapil 3
189	Rehab Ruang Guru / Kantor SDN, Bakarangan 1, Kec. Bakarangan		Bakarangan	Dinas Pendidikan	Dapil 3
190	Pembangunan Toilet dan Sanitasi SDN.Bakarangan,Kec. Bakarangan		Bakarangan	Dinas Pendidikan	Dapil 3
NO	KEGIATAN	TARGET / VOLUME (MKM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN

191	Pembuatan Tribun Thap 2 Lapangan Sepak Bola Desa Parigi Simbar Kecamatan Bakarangan		Bakarangan	DPU-PR	Dapil 3
191	Pengaspalan Jalan Pasar Desa Linuh RT.01/RW.01 , Kec. Bungur		Bungur	DPU-PR(BM)	Dapil 1
192	Pengaspalan Jalan Desa Linuh menuju Desa Rantau Bujur RT.01/RW.01,Kec.Bungur		Bungur	DPU-PR(BM)	Dapil 1
193	Pembuatan Paving Blok depan SDN Linuh 2, Desa Linuh,Kec.Bungur		Bungur	Dinas Pendidikan	Dapil 1
194	Jalan Tani RT.01RW.01 Desa Rantau Bujur,Kec. Bungur		Bungur	Dinas Pertanian	Dapil 1
195	Pembangunan Los Pasar Linuh RT.02 Desa Linuh, Kec. Bungur		Bungur	Dinas Perdagangan	Dapil 1
196	Jalan Tani RT.02 ,Desa Linuh,Kec.Bungur (Lanjutan)		Bungur	Dinas Pertanian	Dapil 1
197	Pengaspalan Jalan Talikur RT.03, Desa Linuh, Kec.Bungur		Bungur	DPU-PR(BM)	Dapil 1
198	Pembuatan Drainase Desa Linuh RT.04, Kec.Bungur (Lanjutan)		Bungur	DPU-PR(BM)	Dapil 1
		TARGET / VOLUME (M/KM/UNIT/BUAH)	KECAMATAN	SOPD TUJUAN	KETERANGAN
199	Pengaspalan Jalan Limpina RT.04, Desa Rantau Bujur, Kec. Bungur		Bungur	DPU-PR(BM)	Dapil 1
200	Pengaspalan Jalan Limpina RT.05, Desa Rantau Bujur,		Bungur	DPU-PR(BM)	Dapil 1

Kec. Bungur

Sukses Bagi Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 yang ditargetkan, telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Hanya 1 (satu) indikator yang tidak terealisasi sesuai target yang diharapkan. Berikut perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022 :

Tabel 3.1
Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Program dan Kegiatan	Realisasi Kinerja
Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	Seluruh Program dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Survey IKM	91,2
	Persentase keluhan anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Fasilitas Tugas DPRD	100%
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	Fasilitas Tugas DPRD	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	75%
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	Pembahasan Kebijakan Anggaran, Peningkatan Kapasitas DPRD	100%

Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	90%
Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
Rata-rata capaian dari sasaran strategis 93,8%				

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Analisis realisasi dan capaian kinerja Sekretariat DPRD pada LKJIP Tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja	
		2022	
		TARGET	REALISASI
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	91,2 %
	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	75%
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	90%

Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%
--	--	------	------

Tabel 3.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 DAN TAHUN 2018 DAN PERBANDINGAN

REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DAN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2018		2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	90%	80%	90%	87%	80%	120%
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	70%	90%	100%
	Persentase Raperda yang tepat waktu	100%	40%	100%	95%	80%	100%
	Persentase dukungan Kegiatan Fasilitas Anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100%	80%	100%	100%	90%	100%

Bab III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja			
		2021		2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	3	4
	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	87,14	80	91,2
	Persentase keampilan anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100%	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	62,5%	80%	75%
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%	90%	100%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	73,6%	65%	90%

Bab III

Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%
--	--	------	------	------	------

Pada tahun 2022 sasaran berjumlah 3 (tiga) sasaran dengan realisasi masing2 kinerja rata-rata 93,8%. Hanya 1 sasaran yang tidak memenuhi target yang tercapai sebesar 75% dari target 80% akan tetapi realisasi tidak terlalu rendah dari target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh program dan Kegiatan serta capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 telah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Analisis capaian kinerja Sekretariat DPRD pada LKJIP Tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2022	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	80	91,2
	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	80%	75%

	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	90%	100%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	65%	90%
Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak 7 (tujuh) IKU, realisasi target kinerja tahun 2022 telah mencapai target jangka menengah yakni melebihi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh program Sekretariat DPRD tahun 2022 telah mencapai target jangka menengah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 hasil capaian 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelayanan kesekretariatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Pada tahun 2022 hanya terdapat 2 Program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, 14 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang mendukung pelayanan terhadap kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin yaitu Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Tingkat keberhasilan Kegiatan ini berhasil terakomodir dengan baik.

Manfaat dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

- Terasilitasi layanan makanan dan minuman anggota DPRD Kabupaten Tapin
- Terasilitasinya kebersihan dan keamanan Kantor DPRD Kabupaten Tapin
- Terasilitasinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa koran dan media cetak untuk penunjang tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Terjalannya sinergitas dan keharmonisan antara Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Tapin dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin

Adapun *kendala* yang dihadapi pada Program dan kegiatan yang terdapat dalam administrasi pelayanan perkantoran adalah sebagai berikut:

- Kurangnya SDM dan personalia yang memadai dalam melaksanakan tugas kebersihan dan keamanan
- Belum ditetapkannya penanggung jawab dan SOP (standar operasional prosedur) dalam menjalankan tugas kebersihan dan keamanan
- Jadwal Kegiatan Dewan yang kadang berubah sewaktu-waktu, kadang membuat penyediaan makanan dan minuman terkendala dan menyebabkan miss komunikasi
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pelayanan terhadap kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Tingkat keberhasilan Kegiatan ini berhasil terakomodir dengan baik.

Manfaat dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- Terasilitasinya perbaikan, pergantian dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan Kendaraan Dinas Jabatan untuk Pimpinan.
- Terasilitasinya perbaikan dan pemeliharaan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tapin Ruang kerja dan ruangan rapat Pimpinan dan Anggota DPRD
- Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa, meja kursi dll Pimpinan DPRD Kabupaten Tapin

Kendala dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- Kekurangan Penganggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, kadang menjadi polemik tersendiri karena biasanya akan menuai protes khususnya dari Pimpinan.
- Waktu pengerjaan yang singkat membuat Pekerjaan Rehab tidak maksimal

- Kualitas barang tidak dijadikan standar utama dalam pengadaan barang milik daerah sehingga terdapat barang yang tidak bisa dipakai lama sudah rusak.
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pelayanan terhadap kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Tingkat keberhasilan Kegiatan ini berhasil terakomodir dengan baik.

Manfaat dari Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD adalah sebagai berikut:

- Terasilinasinya Hak administratif, protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten Tapin sesuai PP Nomor 18 tahun 2017
- Tersedianya Pakaian Dinas untuk menunjang kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Kendala dari Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD adalah sebagai berikut:

- Tidak cocok hasil pekerjaan yang diharapkan oleh Pimpinan dan Anggota terhadap Pengadaan Pakain Dinas kerja
- Adanya Pandemi Internasional Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya aktivitas kegiatan, sehingga menyebabkan agenda tahunan Medical check up tahun ini mepet di akhir tahun dan ada kenaikan Tarif dari RS Propinsi pelaksanaan medical check up.
- Keinginan Anggota DPRD meminta kenaikan Penghasilan kadang juga merupakan kendala dari Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Seluruh Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD merupakan kegiatan yang mendukung pelayanan terhadap kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapin dan mendukung pencapaian indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin. Tingkat keberhasilan Program ini berhasil terakomodir dengan baik. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan Program Inti DPRD Kabupaten Tapin.

- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Pembahasan Kerjasama Daerah
Manfaat dari Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tapin yang mendukung Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
- Berfungsinya Legislatif sebagai pembentuk peraturan

Kendala dari Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD adalah sebagai berikut:

- Kurangnya sinkronisasi antar Komisi DPRD Kabupaten Tapin dalam pembuatan perda
 - Lemahnya penggalian materi sebagai bahan pembentukan perda
 - Kualitas SDM Anggota DPRD berkaitan dengan bidang Hukum dan Peraturan Per-UU-an tidak merata
 - Penekanan prioritas Ranperda yang masih belum jelas dan terukur
- Pembahasan Kebijakan Anggaran

Manfaat dari Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Terfasilitasinya Rapat-rapat Pembahasan Anggaran
- Terkoordinasi nya keinginan yang sejalan antara Eksekutif dan Legislatif
- Terfasilitasinya APBD Kabupaten Tapin

Kendala dari Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Jadwal Kegiatan DPRD yang sewaktu-waktu sering berubah merupakan salah satu kendala yang sering terjadi.
 - Terdapat ketidaksesuaian Eksekutif atas permintaan Legislatif.
- Peningkatan Kapasitas DPRD

Manfaat dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD adalah sebagai berikut:

- Terfasilitasinya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD
- Tersedianya Kelompok pakar dan Tim Ahli untuk menunjang Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
- Terlaksananya Kegiatan rapat- rapat DPRD
- Sebagai Dokumentasi Rapat dan Kodifikasi
- Sumber informasi peserta yang tidak hadir

- Sebagai panduan agar acara berjalan dengan lancar terukur dan sistematis

Kendala dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD adalah sebagai berikut:

- Jadwal Kegiatan DPRD yang sewaktu-waktu sering berubah merupakan salah satu kendala yang sering terjadi
- Kualitas SDM Notulen Rapat yang kurang memadai
- Kurangnya Bimbingan Teknis pembuatan naskah risalah
- Keterbatasan Pemakaian Bahasa Indonesia pada saat rapat berlangsung membuat Aplikasi pembuat risalah e-risalah tidak berfungsi.
- Kurangnya personalia dan kurang aktifnya Tim Humas DPRD dalam mempublikasikan Kegiatan-kegiatan DPRD dizaman yang serba digital secara online lewat media sosial belum berfungsi maksimal

- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Manfaat dari Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Terakomodir nya aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD
- Terakomodirnya Pokok-pokok Pikiran DPRD dari hasil Reses
- Sebagai sarana para konstituen memberikan aspirasi lewat Kegiatan Reses

Kendala dari Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Belum terfasilitasi secara maksimal Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD
- Kurang nya SDM yang memadai yang mengakomodir Aspirasi yang masuk
- Tidak maksimalnya kegiatan tatap muka karena pembatasan dan penerapan protocol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 ini.
- Kurangnya SDM masyarakat yang aktif dalam memberikan aspirasi, sehingga pertemuan menjadi kurang efektif dan efisien.

- Fasilitasi Tugas DPRD

Manfaat dari Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

- Meningkatnya pengetahuan terhadap tugas dan fungsi Anggota Legislatif
- Berkontribusi membangun daerah lebih baik lagi dari hasil konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten/kota atau propinsi yang lebih maju

Kendala dari Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD adalah sebagai berikut:

- Jadwal Kegiatan DPRD yang sewaktu-waktu sering berubah merupakan salah satu kendala yang sering terjadi
- Waktu yang diberikan untuk menghubungi tempat tujuan yang akan dikunjungi kadang terbatas
- Tidak mempunyai kontak atau link tempat yang akan dituju untuk konsultasi dan study banding, sehingga kadang harus mencari lewat google dan nomor kontak yang terdaftar digoogle tidak jarang juga tidak bisa dihubungi

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pasca Pandemi Covid-19 pada tahun 2022 membuat Perekonomian Indonesia Khususnya Kabupaten Tapin mulai bangkit. Segala aspek Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dll mengalami kendala yang berat saat Pandemi covid-19, akan tetapi pada tahun 2022 berbagai aspek berangsur membaik. Namun beberapa Kegiatan masih ada yang terpaksa ditunda dan belum bisa dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD ini adalah sebesar Rp 56.367.015.998,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 36.748.823.500,- atau 65,20 persen sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.618.192.498,- atau 34,80 persen. Dibanding tahun 2021 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 32.478.044.152,- dan tercapai sebesar 78,40% tahun ini hanya sebesar 65,20%, hal ini disebabkan adanya berbagai faktor internal dan eksternal yang ada di SKPD. Pengaruh yang paling besar yaitu tingginya keinginan dan permintaan Anggota DPRD dalam penganggaran kegiatan mereka tetapi tidak sesuai dengan realisasi.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan Pelayanan kesekretariatan demi terwujudnya pelayanan yang optimal ke Dewan yang sangat ditentukan oleh komitmen,

dukungan dan keterlibatan semua komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin.

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi diatas, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu.
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan rutin .
3. Meningkatkan kualitas konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah.
4. Menambah kualitas SDM dengan mengadakan pendidikan dan latihan/bintek sehingga lebih cepat pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membuat SOP pedoman teknis bagi Pelayanan Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sarasanya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dan Fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin sebagaimana Tupoksi yang diimban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Tapin.

Analisis kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya dari Eselon 2 sampai Eselon 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

EVALUASI KEMAJUAN KINERJA

No	Eselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	Memungkinkannya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	114%
			Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%
			Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%
			Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	93,8%
			Persentase masalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	111%
		Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	138%

Bab III

		Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%
Eselon III	Meningkatkan Kapasitas SDM	Persentase Aparatur sesuai kompetensinya	80%	80%	
	Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Kegiatan Dewan yang Terasiliasi dalam meningkatkan kapasitas meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80%	100%	
	Meningkatkan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80%	100%	
	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80%	100%	
	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persentase Kegiatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat yang terselesaikan Tepat Waktu	80%	100%	
	Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi	80%	100%	
	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Persentase rapat-rapat dewan yang memenuhi	80%	85%	

Bab III

		korum			
Eselon III	Meningkatkan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%		100%
	Terlaksananya kegiatan reses Anggota DPRD	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 Kali		100%
	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Presentase rapat-rapat Anggaran dan Pengawasan yang memenuhi korum	80%		85%
Eselon IV	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya data dan administrasi kepegawaian	12 Bulan		100%
	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	12 Bulan		100%
Eselon IV	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan administrasi keuangan, semesteran, Akhir tahun dan lain-lain yang tersedia	100%		100%
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Tertelaksananya Fasilitas Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Tertelaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	12 Bulan		100%
		Pelayanan Rapat Pembahasan Peraturan Daerah yang	12 Bulan		100%

Bab III

			terfasilitasi			
			Tertaksananya Kegiatan Rapat Dengar Pendapat	12 Bulan	100%	
			Tertaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Paket	100%	
			Tertaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Paket	100%	
	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Tersedianya Informasi Kegiatan DPRD	Tertaksananya kegiatan Fasilitasi Rapat-rapat Penganggaran DPRD dan pertanggung jawaban DPRD	1 Paket	100%	
	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Tertaksananya Fasilitasi Kegiatan pengawasan yang terlaksana	Tertaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	
			Membandingkan dan menyelaraskan Pokok-Pikiran DPRD dengan RPJMD	100%	100%	

Analisis kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan indikator kinerja individu (IKI) adalah sebagai berikut:

No	Staff/JF	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	CAPAIAN 2022
	Bagian Umum dan Keuangan	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya data seluruh barang milik daerah ke dalam kartu inventaris barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI) dan buku Induk Inventaris (BI) sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah.	200 Buah	200 Buah
	Bagian Umum dan Keuangan	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya data barang milik daerah termasuk Kartu Inventaris Barang (KIB), Sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah.	100 Buah	100 Buah
	Bagian Umum dan Keuangan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Tersedianya laporan keuangan dan menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang telah di verifikasi sesuai prosedur	12 Laporan	12 Laporan

		dan keuangan	dan ketentuan.		
			Tersedianya surat pertanggungjawaban (SPJ) Berdasarkan Buku Kas umum	12 Laporan	12 Laporan
		Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Data usulan program dan kegiatan dari semua Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Tapin;	3 Dokumen	3 Dokumen
	Sub Bagian Program dan Keuangan		Tersedianya draft Konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Draft Konsep Rencana Kerja (RENJA), draft Konsep Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), draft Konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT), draft Konsep Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kab. Tapin	6 Dokumen	6 Dokumen
	Sub Bagian Tim Usaha dan Pengembangan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya data Kepegawaian pada buku penjiangan agar memudahkan pencarian dan pengendalian tahapan	13 Berkas	13 Berkas

	Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya data Kepegawaian pada buku pengujian agar memudahkan pencarian dan pengendalian tahapan	13 Berkas	13 Berkas
	Bagian Umum dan Perlengkapan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya data Kepegawaian pada buku pengujian agar memudahkan pencarian dan pengendalian tahapan	13 Berkas	13 Berkas
	Bagian Umum dan Perlengkapan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya Pencatatan dan pengendalian surat masuk, surat keluar sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) Tahapan	240 Kali	240 Kali
	Bagian Umum dan Perlengkapan	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya daftar urut kepegawaian (DUR) Nonmatrif pegawai dan data kebutuhan pegawai agar tersedia data kepegawaian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku tahapan	240 Kali	240 Kali
	Sub Bagian Fasilitas Penganggaran	Tersedianya	Tersedianya bahan dan menyusun	3 Berkas	3 Berkas

		kegiatan fasilitasi Rapat-rapat Penganggaran DPRD dan pertanggung jawaban DPRD	bahan pembalasan APBD/APBD-P, Penertanggung jawaban APBD dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
			tersediaanya bahan dan menyusun laporan kinerja dan rencana fasilitasi Penganggaran	3 Berkas	3 Berkas
	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan dan Pengawasan	Tersediaanya Bahan Bahan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD dalam rangka Penyelenggaraan Asistensi Masyarakat dan Peleok - Peleok Pikiran	3x Masa Reses	3x Reses
			Tersediaanya Hasil Peleok-Peleok Pikiran sesuai catatan hasil reses dan masukan anggota DPRD untuk persetujuan dan penertangan lebih lanjut	1 Hasil peleok peleok pikiran	1 Hasil Peleok
	Bagian Hukum dan Persidangan	Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Tersediaanya bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)	20 Paket	20 Paket
			Tersediaanya bahan dalam rangka	20 Paket	20 Paket

			meneliti usul prakarasa dari instansi terkait		
			Tersedianya konsep Naskah Akademik Raperda Inisiatif sesuai petunjuk teknis dan menjadi bahan kelengkapan penyusunan, pembahasan dan pencetupan Raperda Inisiatif DPRD.	6 dokumen	6 dokumen
	Sub Bagian Perundang-undangan dan Humas	Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hakam terhadap Raperda	Persentase Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapan Siap Sesuai Jadwal dan terkokumentasi secara digitalisasi dengan baik	100% 92 kali rapat	97 kali rapat BANNMUS, RDP ,AUDENSIL,RAKOR,RAPEM,EKSPOSE,jmasa sidang III
	Sub Bagian Perundang-undangan dan Humas	Meningkatnya kualitas fasilitas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Tersedianya dokumen risalah, resume, atau latisur, serta laporan hasil pelaksanaan rapat DPRD, sesuai prosedur dan jadwal yang berlaku untuk menjadi bukti hasil rapat dan bahan selanjutnya.	24 Dokumen	24 Dokumen
	Kanubag Persidangan dan Rissalah	Terlaksananya Fasilitas Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Tersedianya laporan pelaksanaan tugas hasil rapat kerja DPRD	12 Berkas	12 Berkas
	Sub Bagian Rissalah dan Persidangan	Terlaksananya Fasilitas Rapat dan Persidangan			

Bab III

		sesuai jadwal				
--	--	---------------	--	--	--	--

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD ini didukung dengan adanya program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Keberhasilan yang dicapai didukung oleh anggaran keuangan yang diajukan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan dan telah terakomodasi pembiayaannya serta Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD, DPRD, dan OPD di Kabupaten Tapin untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, dengan 7 kegiatan yaitu :

1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
2. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
3. Pembahasan Kebijakan Anggaran
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pembahasan Kerja Sama Daerah
7. Fasilitasi Tugas DPRD

Dalam hal optimalisasi Pelayanan kepada DPRD Kabupaten Tapin, setiap tahun Sekretariat DPRD berupaya memaksimalkan fungsi dan tugas DPRD. Termasuk perencanaan Program dan Kegiatan untuk menunjang Visi dan Misi SKPD.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan DPRD.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi SDM penyelenggaraan urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokolan.
4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin melaksanakan 2 program dengan 14 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.367.015.998,-. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 36.748.823.500,- atau 65,20%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala waktu pelaksanaan juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran, serta tingginya permintaan Dewan selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada RPJMPD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan **Sangat Baik**, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan bahwa realisasi dari 7 indikator kinerja sesuai target. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Kegiatan 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.323.581.198	25.816.414.609	79,87
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.600.000	90.000.000	99,34
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.600.000	90.000.000	99,34
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat	5.459.200.494	3.053.461.233	55,93

Daerah				
	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.265.700.494	2.861.761.233	54,35
	4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	105.000.000	104.400.000	99,43
	4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.200.000	3.600.000	85,71
	4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84.300.000	83.700.000	99,29
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.552.020.800	5.166.869.046	93,06
	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.581.500	32.285.000	99,09
	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.406.500	80.483.500	92,08
	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.743.000	221.541.500	78,35
	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	137.243.300	94.356.700	68,75
	4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	126.000.000	123.300.000	97,86
	4.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	23.115.500	17.615.500	76,21
	4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000	80.248.000	72,95
	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.752.931.000	4.517.038.846	95,04
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.380.730.800	978.065.800	70,84
	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	668.730.800	582.948.800	87,17
	4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	712.000.000	395.117.000	55,49
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		514.000.000	396.571.050	77,15
	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.400.000	17.400.000	100,00
	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000	146.871.050	58,28

	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.600.000	232.300.000	94,97
	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.821.013.004	2.260.703.644	80,14
	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	460.010.000	284.859.682	61,92
	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	364.653.600	281.546.712	77,21
	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.643.200	19.900.000	45,60
	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.952.706.204	1.674.397.250	85,75
	4.02.01.2.13 Penataan Organisasi	75.223.400	61.875.000	82,25
	4.02.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75.223.400	61.875.000	82,25
	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.430.792.700	13.808.868.836	84,04
	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.983.657.200	13.440.662.586	84,09
	4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	372.135.500	329.531.250	88,55
	4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	38.675.000	51,57
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.043.434.800	10.932.408.891	45,47
	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	601.857.600	443.250.000	73,65
	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	137.108.000	106.500.000	77,68
	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	244.749.800	186.750.000	76,30
	4.02.02.2.01.04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	219.999.800	150.000.000	68,18
	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	190.500.000	171.250.000	89,90
	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	37.275.000	30.125.000	80,82
	4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	20.775.000	20.625.000	99,28

	PPAS			
	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	35.900.000	34.375.000	95,75
	4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	35.900.000	28.375.000	79,04
	4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	0	0	0,00
	4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	60.650.000	57.750.000	95,22
	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	1.243.542.200	1.073.504.000	86,33
	4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	471.855.200	410.467.000	86,99
	4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	306.000.000	210.000.000	68,63
	4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	465.687.000	453.037.000	97,28
	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	351.150.000	325.200.000	92,61
	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	11.250.000	7.725.000	68,67
	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.575.000	4.125.000	90,16
	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	335.325.000	313.350.000	93,45
	4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	30.000.000	30.000.000	100,00
	4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	30.000.000	30.000.000	100,00
	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	21.626.385.000	8.889.204.891	41,10
	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.244.426.000	7.798.343.611	48,01
	4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.381.959.000	1.090.861.280	20,27
	Total	56.367.015.998	36.748.823.500	65,20

BAB

IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) disusun dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin menyusun LKJIP tahun 2022 sebagai cerminan dari hasil kinerja Sekretariat DPRD selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin tahun 2022, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2022.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemukan berbagai kendala baik faktor internal maupun eksternal dan telah diupayakan untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) dengan mengoptimalkan kekuatan (*Strengths*) yang ada, sehingga dapat meminimalkan kendala yang dihadapi agar tugas organisasi bisa tercapai dengan baik.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan terhadap Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80	91,2%	114%
	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

	Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%	100%	100%
	Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%	75%	93,8%
	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%	100%	111%
Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%	90%	138%
Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari 7 indikator, sebanyak 6 indikator mencapai hasil 100%, hanya 1 indikator yang tidak tercapai 100% yaitu hanya 93,8%. Akan tetapi dari seluruh hasil capaian indikator Sekretariat DPRD mencapai rata-rata 93,8%. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan **Sangat Baik**, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100% yakni hanya mencapai 65,20%. Namun realisasi kinerja Sekretariat DPRD dari 7 indikator kinerja yang ditargetkan semua mencapai target yang diharapkan, hanya 1 indikator yang tidak tercapai tetapi realisasinya tidak terlalu jauh dari target.

Pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun penyelenggaraan tugas secara struktural sebagian besar dapat berjalan dengan lancar, di samping evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat disinergikan dengan langkah-langkah kegiatan yang akan datang.

Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan Visi dan Misi organisasi.

Dari kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022 diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan ditahun 2023 sehingga dihasilkan kegiatan yang mengacu pada sasaran dan program yang bersifat transparan dan akuntabel.

Semoga LKJIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD pada tahun-tahun berikutnya.

Rantau, Februari 2023

SEKRETARIS DPRD,



H.NOOR IFANSYAH,SKM,MS

NIP.19660723 198903 1 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ILNOOR IFANSYAH, SKM, MS**

Jabatan : Sekretaris DPRD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. M. ARIFEN ARPAN, MM**

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

PIHAK PERTAMA,



ILNOOR IFANSYAH, SKM, MS
NIP. 19660723 198903 1 012

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN
2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan terhadap kegunaan anggota DPRD	Indeks Kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80%
		Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase fasilitasi tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja DPRD	100%
		Persentase Naskah Akademik untuk Raperda Inisiatif yang terselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase resolusi rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	90%
2	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat	Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	65%
3	Meningkatnya keselarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD	Persentase Pokok Pikiran DPRD Yang Dinyatakan Selaras Dengan RPJMD	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 30.061.669.373,00	APBD
2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 19.744.321.500,00	APBD
	Rp 49.805.990.873,00	

Bupati Tapin,



Des. H. M. Arifin Arpan, MM

Rantau, 17 Januari 2022

Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin



ELINDORJEANSYAH SKM, MS

Bembina Utama Muda

NIP. 196607211989031012

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kapasitas SDM	Persentase Aparatur sesuai kompetensinya	80%
2	Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Kegiatan Dewan yang Terlaksanakan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80%
3	Meningkatkan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80%
4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	80%

Kegiatan/Sub-kegiatan

Anggaran

1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.454.700.369
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	4.502.459.800
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.065.180.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	411.200.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.045.986.504
6	Penataan Organisasi	Rp	61.950.000
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp	16.430.792.700
8	Fasilitas Tugas DPRD	Rp	17.412.616.000




Sekretaris DPRD

B. MOOR IFANSYAH, SKM, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 19660723 198603 1 012

Rantau, 17 Januari 2022

Kabag. Urusan dan Keuangan


H. Muhammad Yusuf, S.Sos
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19640503 198602 1 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persentase Kegiatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat yang terselesaikan Tepat Waktu	80%
2	Meningkatkan Keterediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Persentase Naskah Akademik yang terfasilitasi	80%
2	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Persentase rapat-rapat dewan yang memenuhi korum	80%

Kegiatan/Sub-kegiatan
 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 Peningkatan Kapasitas DPRD
 Pembahasan Kerja Sama Daerah

Anggaran
 Rp 803.051.000
 Rp 918.354.500
 Rp 30.000.000

Rantau, 17 Januari 2022

Kabag. Sekur dan Persidangan



Mulyady, SH
 Pejabat TK I (Ibid)
 NIP. 19751111 201001 1 016

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Meningkatkan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%
2	Tertindakannya kegiatan reses Anggota DPRD	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 Kali
3	Meningkatkan partisipasi Anggota DPRD	Persentase rapat-rapat Anggaran dan Pengawasan dewan yang memenuhi korum	80%

Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 392.400.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 187.900.000



Rantau, 17 Januari 2022

Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Ahmad Rizal, ST
Pembina Tk. I (IVb)
NIP. 19730622 198903 1 012

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya data dan administrasi kepegawaian	12 Bulan
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	12 Bulan

Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran
1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik - Penerangan bangunan kantor	Rp 32.581.500
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 62.107.800
3 Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 167.972.400
4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp 81.924.600
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 126.000.000
6 Penyediaan Bahan/Material	Rp 17.615.500
7 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 87.450.000
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 3.908.808.000
9 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 575.180.000
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 490.000.000
11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 11.600.000
12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 198.000.000
13 Penyediaan Jasa Perjalanan Umum Kantor	Rp 201.600.000
14 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp 327.993.800
15 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 185.851.600
16 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 43.643.200
17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.488.487.904
18 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 61.950.000
19 Penyediaan pakewil Dinas dan Atribut DPRD	Rp 372.135.500
20 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 75.000.000
21 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 14.681.062.000
22 Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Rp 2.731.554.000

Rantau, 17 Januari 2022

Kabag Umum dan Keuangan

H. Muhammad Yusuf, S.Sos.
Pembina Tk. I (IV/D)
NIP. 19640503-198802 1 003

Pt. Kasubtug Tata Usaha, Kepegawaian, dan Pertengakapan

Elvariansyah
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19661020-198403 1 008

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan administrasi keuangan, semesteran, Akhir tahun dan lain-lain yang tersedia	100%

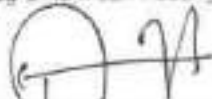
Kegiatan/Sub-kegiatan

Anggaran

1	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	89.400.000
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.265.700.369
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	103.600.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Rp	3.000.000
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Rp	82.200.000

Rantau, 17 Januari 2022.

Kabag Urum dan Keuangan



H. Muhammad Yusuf S Sos
Pembina Tk.I (I/b)
NIP. 19640503 198602 1 003

Kesubbag Program dan Keuangan



Ristya Hahsa SE
PENATA MUDA TK I
NIP. 19860109 200604 2 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI

Sekretariat DPRD

UNIT KERJA

Bagian Umum dan Keuangan

ATAS NAMA

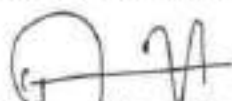
Reza Rafsanjani Najad, S.IP

TAHUN ANGGARAN

2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya data seluruh barang milik daerah ke dalam kartu inventaris barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangani (KIR), Buku Inventaris (BI) dan buku induk inventaris (BIi) sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah.	200 Buah

Kabag Umum dan Keuangan



H. Muhammad Yusuf, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640503 198602 1 003

Rantau, 17 Januari 2022

Pengelola Barang



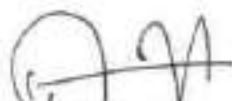
Reza Rafsanjani Najad, S.IP
Penata Muda (III/a)
NIP : 19851023 201001 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ATAS NAMA : Arief Rahman Hakim, S.Kom.
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Melakukan penggandaan data dan atau program	200 Data
2		Membuat laporan operasi komputer	244 Laporan
3		Membuat dokumentasi file yang tersimpan di dalam media komputer	200 Dokumen
4		Melakukan Perakaman data Tanpa Validasi	3.500.000 Karakter
5		Melakukan Perakaman data Dengan Validasi	12 Laporan
6		Membuat laporan hasil perekaman data	12 Laporan
7		Melakukan deteksi/memperbaiki kerusakan sistem komputer	100 Karakter
8		Melakukan pemasangan peralatan komputer	20 Buah
9		Mengikuti diklat pracom	1 Kegiatan

Kabag Umum dan Kepegawaian



H. Muhammad Yusuf, S.Sos
Pembina Tk. I (P/b)
NIP 19540503 198602 1 003

Rantau, 17 Januari 2022
JF Pracom Pelaksana Lanjutan



Arief Rahman Hakim, S.Kom.
Ponata Muda Tk. I (P/b)
NIP : 19770411 201001 015

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD**

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan
ATAS NAMA : Arief Rahman Hakim, S.Kom.
TAHUN ANGGAHAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun data kepegawalan, evaluasi, serta administrasi kepegawalan	Tersedianya data Kepegawalan pada buku penjagaan agar memudahkan pencarian dan pengendalian tahapan	13 Berkas

Kabag Umum dan Keuangan

H. Muhammad Yusuf, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640503 198602 1 003

Rantau, 17 Januari 2022
JFT Prakom Pelaksana Lanjutan

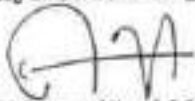
Arief Rahman Hakim, S.Kom,
Pengata Muda (III/b)
NIP : 19770411 201001 1 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Bagian Umum dan Peningkatan
ATAS NAMA : Rahman S.AP
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Terselenggaranya data kepegawaian pada buku pengajian agar memudahkan pencarian dan pengendalian tahapan	13 berkas

Kabag Umum dan Keuangan



H. Muhammad Yusuf, S.Sos
Pembina Tk. I (W/D)
NIP. 19640503 198602 1 001

Rantau, 17 Januari 2022
Pengadministrasi Umum



Rahman S.AP
Penata Muda (III/a)
NIP. 198002082007011014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI
UNIT KERJA
ATAS NAMA
TANGGUNG JAWAB

Sekretariat DPRD
Kabag Umum dan Keuangan
Rantiauor, S-AP
2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun data kepegawaian, termasuk data administrasi kepegawaian	Tersedianya daftar unit kepegawaian (DUK) nominal pegawai dan data kebutuhan pegawai agar tersedia data kepegawaian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku terbaru	202 kali

Kabag Umum dan Keuangan

H. Muhammad Yusuf, S.Sen
Pembina Tk I (W/B)
NIP. 196405011986021003

Rantiau, 17 Januari 2022
Pengelola Administrasi Umum

Rantiauor, S-AP
Pengantar TK I (W/B)
NIP. 19681310200101015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Bagian Umum dan Perengkapan
ATAS NAMA : Syamsul Bakhrie
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian	Tersedianya Pencatatan dan pengagendaaan surat masuk, surat keluar sesuai dengan standart Operasional Prosudur (SOP) Tahapan	240 Kali

Kabag Umum dan Keuangan

H. Muhammad Yusuf, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640503 198602 1 003

Raveno, 17 Januari 2022
Pengadministrasi Umum

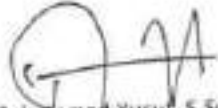
Syamsul Bakhrie
Pengatur Tk. I (II/d)
NIP : 19710325 200604 1 014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Bagian Umum Dan Keuangan
ATAS NAMA : Muhammad Yusuf
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mereencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta administrasi perkantoran	Tersedianya data barang milik daerah termasuk Kartu Inventaris Barang (KIB), Sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah.	100 Buah

Kabag Umum dan Keuangan


H. Muhammad Yusuf, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640503 198602 1 003

Rantau, 17 Januari 2022
Pembantu Pengelola Barang milik D.


Muhammad Yusuf
Penata Muda TK.I (III/b)
NIP - 19660626 1993 031 011

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Bagian Program dan Keuangan
ATAS NAMA : Rahman, S.E.
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan keuangan dan menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang telah di verifikasi sesuai prosedur dan ketentuan.	12 Laporan
		Tersedianya surat pertanggungjawaban (SPJ) Berdasarkan Buku Kas umum	12 Laporan

Kasubag Program dan Keuangan



Risthya Hanisa, S.E.

NIP : 19860109 200604 2 003

Rantau, 17 Januari 2022
Bendahara Pengeluaran



Rahman, S.E.

NIP : 19700428 200701 1 011

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD**

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
 UNIT KERJA : Sub Bagian Program dan Keuangan
 ATAS NAMA : Rudi Eswanto, S.E.
 TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Data usulan program dan kegiatan dari semua Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Tapin;	3 Dokumen
		Tersedianya draft Konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Draft Konsep Rencana Kerja (RENJA), draft Konsep Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), draft Konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT), draft Konsep Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kab. Tapin	6 Dokumen

Kasubbag Program dan Keuangan

Risthya Hanisa, S.E.
 Penata Muda TK.1 (IIB)
 NIP : 19860109 200604 7 001

Rantau, 17 Januari 2022
 Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Rudi Eswanto, S.E.
 Penata Muda (IIB/a)
 NIP : 19931301 202012 1 006

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Tertelaksananya Fasilitasi Rapat dan Perbidangan sesuai jadwal	Tertelaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	12 Bulan
		Pelayanan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang tertelaksana	12 Bulan
		Tertelaksananya Kegiatan Rapat Dengar Pendapat	12 Bulan

Kegiatan/Sub-kegiatan

Anggaran

Peningkatan Kapasitas DPRD

1 Penyusunan Program Kerja DPRD

Rp

297.687.000

Kabag Hukum dan Perbidangan



Rakhady, Str
Penata Tk. I (Hid)
NIP. 19751111 201001 1 016

Rantau, 17 Januari 2022

Sub Koordinator Perbidangan dan Risalah



KASRIL ANWAR, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19770819 199603 1 004

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Tersedianya Informasi Kegiatan DPRD	Tertaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Paket
		Tertaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Paket
2	Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Tersedianya naskah akademik yang menjadi Ranperda insiatif DPRD	1 Paket


Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran
1 Penyediaan bahan/material	Rp 17.615.500
2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 314.667.500
3 Penyusun bahan Komunikasi dan Publikasi	Rp 30.000.000
4 Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Rp 138.301.400
5 Pembahasan rancangan peraturan Daerah	Rp 344.748.800
6 Fasilitas penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah Akademik	Rp 319.999.800
7 Penyediaan kelompok pakar dan ahli	Rp 306.000.000

Rantau, 17 Januari 2022

Kabag Hukum dan Persidangan


M. Buridy, SH
Penasihat Tk. I (III/a)
NIP. 19751111 201001 1 016

Sub Koordinator Hukum dan Perundang-undangan


Hetty Irawan, S.AP
Penasihat Muda (III/a)
NIP. 19750503 200604 1 019

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI
UNIT KERJA
ATAS NAMA
TAHUN ANGGARAN

- Sekretariat DPRD
- Sub Bagian Kajian Perundang - Undangan dan Humas
- Khaderian, A.Md.
- 2022

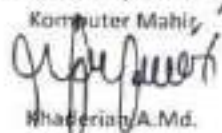
No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Siap Sesuai jadwal dan terdokumentasi secara digitalisasi dengan baik	100% 92 kali rapat

Kabag Hukum dan Persidangan



Matoroty, SH
Penata/K. I (W/d)
NIP. 19751111 201001 1 016

Rantau, 17 Januari 2022
Analis Humas/IF.Pranata



Khaderian, A.Md.
Penata TK. I/ III.b
NIP. 19800410 201001 1 020

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI
UNIT KERJA
ATAS NAMA
TAHUN ANGGARAN

Sekretariat DPRD
Bagian Hukum dan Persidangan
Dedy Agus Pratama, SH
2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Tersedianya bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)	20 Paket
		Tersedianya bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait	20 Paket

Kabag Hukum dan Persidangan


MATURIDY, SH
Pejabat Tk. I (III/d)
NIP. 197511112010011016

Rantau, 17 Januari 2022
Ahli Pertama Perancang
Perundang-Perundangan


DEDY AGUS PRATAMA, SH
Penda Muda (II/a)
NIP. 199308182020121003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD**

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Sub Bagian Perundang-undangan dan Humas
ATAS NAMA : Bintari Widyaputri Utami, SH
TAHUN ANGGARAN : 2022


No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketersediaan Fasilitas dan Bahan Kajian Hukum terhadap Raperda	Tersedianya konsep Naskah Akademik Raperda inisiatif sesuai petunjuk teknis dan menjadi bahan kelengkapan penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda Inisiatif DPRD.	6 kali

Kabag Hukum dan Persidangan



Mataridy, SH
Penata K I (III/d)
NIP. 197517112010011016

Rantau, 17 Januari 2022
Analis Produk Hukum



Bintari Widyaputri Utami, SH
Penata Muda (III/a)
NIP. 199708302020122010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD

UNIT ORGANISASI
UNIT KERJA
ATAS NAMA
TAHUN ANGGARAN

: Sekretariat DPRD
: Sub Bagian Risalah dan Persidangan
: Hj. Rasmita
: 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Fasilitas Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Tersedianya laporan pelaksanaan tugas hasil rapat kerja DPRD	12 Berkas

Kasubag Risalah dan Persidangan



Kaspul Anwar, S.Sos.
NIP : 19770815 199903 1 004

Rantau, 17 Januari 2022
Penyusun Risalah



Hj. Rasmita
NIP : 19660417 200701 2 021

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD**

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Kasubbag Persidangan dan Risalah
ATAS NAMA : Akbarudin
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitas Rapat dan Persidangan sesuai jadwal	Tersedianya dokumen risalah, resume, atau ihtisar, serta laporan hasil pelaksanaan rapat DPRD, sesuai prosedur dan juknis yang berlaku untuk menjadi bukti hasil rapat dan bahan selanjutnya.	24 Dokumen

Kasubbag Persidangan dan
Risalah



Kaspul Anwar, S.Sos.
Penata Tk. I (III/d)
NIP - 19770815 199903 1 004

Rantau, 17 Januari 2022
Penyusun Risalah



Akbarudin
Pengatur (III/c)
NIP - 19720505 201212 1 005

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Terlaksananya kegiatan fasilitas Rapat-rapat Penganggaran DPRD dan pertanggung jawaban DPRD	Tertepatitasnya rapat-rapat pembahasan anggaran dan pertanggung jawaban APBD	1 Paket

Kegiatan/Sub-kegiatan	Anggaran
1. Pembahasan KUA dan PRAS	Rp 41.400.000
2. Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PRAS	Rp 27.650.000
3. Pembahasan APBD	Rp 34.525.000
4. Pembahasan APBD Perubahan	Rp 34.525.000
5. Pembahasan Laporan Semester	Rp 22.150.000
6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 27.650.000

Rantau, 17 Januari 2022

Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran



Ahmad Rizal, ST
Pejabat Tk. I (IV/b)
NIP. 19730622 199803 1 012



Rahmat Hidayat, S.Sos
Pejabat Tingkat Tk. I (III/d)
NIP. 19770518 200701 1 009

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN**

Tahun Anggaran

2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan pengawasan yang terlaksana	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Bulan
		Membandingkan dan menyelaraskan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan RPJMD	100%

Kegiatan/Sub-kegiatan

Anggaran

1. Kunjungan kerja dalam Daerah	Rp	19.500.000
2. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Rp	4.575.000
3. Pelaksanaan Reses	Rp	368.325.000,00

Rantau, 17 Januari 2022

Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan



Ahmad Rizki, ST
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19730622 199803 1 012



Estrella Soanbana, A.Ka
Pembina (III/c)


NIP. 19746906 200701 1 007

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD**

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
ATAS NAMA : Rysa Khairani
TAHUN ANGGARAN : 2022


No. (1)	SASARAN KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Tertelaksananya kegiatan fasilitasi Rapat-rapat Penganggaran DPRD dan pertanggung jawaban DPRD	Tersedianya bahan dan menyusun bahan pembahasan APBD/APBD-P, Pemertanggung jawaban APBD dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3 Berkas
		tersedianya bahan dan menyusun laporan kinerja dan rencana fasilitasi Penganggaran	3 Berkas

Kasubbag Fasilitasi Penganggaran


Rahmat Hidayat, S.Sos
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19770518 200701 1 009

Rantau, 17 Januari 2022
Pelaksana Sub Bagian
Fasilitasi dan Penganggaran


Rysa Khairani, S.Sos.
Penata Muda (III/a)

NIP. 198504252008012005

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIAT DPRD**

UNIT ORGANISASI : Sekretariat DPRD
UNIT KERJA : SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN
ATAS NAMA : Yan Viktor, A. Md.
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan dan Pengawasan	Tersedianya Bahan Bahan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD dalam rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Pokok - Pokok Pikiran	3x Masa Reses
		Tersedianya Hasil Pokok - Pokok Pikiran sesuai catatan hasil reses dan masukan anggota DPRD untuk persetujuan dan penetapan lebih lanjut.	1 hasil pokok pokok pikiran

Kasubbag Fasilitasi Pengawasan



Ferreyadi Syahbana, A. Ks
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19740906200701 1 007

Rantau, 17 Januari 2022
Pelaksana Sub Bagian
Pengawasan/Pranata
Komputer,



Yan Viktor, A. Md
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. 19760628201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Brigjend H.Hasan Baseri no.37 Telp/Fax (0617) 31122
Kodepos 71111 Rantau

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 175 / 92 / SETWAN/ 2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Tapin;
 - b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
- KETIGA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Rencana Strategis Daerah;
 3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
 4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
 5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
 6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
 7. Menyusun laporan kinerja;
 8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Bappelitbang Kabupaten Tapin;
 11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 17 Januari 2022


Sekretaris DPRD
Kabupaten Tapin,
H. NOOR HANSYAH, SKM, MS
Pembina Utama Muda
NIP.19660723 198903 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin;
2. Wakil Bupati Tapin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
4. Inspektur Kabupaten Tapin;
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Tapin
Nomor : 175 / 91 /SETWAN /2022
Tanggal : 17 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Pengarah dan Penanggung Jawab SAKIP	Sekretaris DPRD
2.	Ketua SAKIP	Kabag Umum dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
4.	Anggota	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
5.	Anggota	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
6.	Anggota	Pit Kepala Sub Bagian TU,Kepegawaian dan Perkengkapan
7.	Anggota	Sub Koordinator Persidangan dan Risalah
8.	Anggota	Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan
9.	Anggota	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran



H. NOOR IBANSYAH, SK, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 19660723 198903 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
Jalan Briegjend H.Hasan Basry No.37 Telp/Fax (0517) 31122

R A N T A U

Kode Pos : 71111

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 175 / 91 / SETWAN / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 17 Januari 2022



H. NOOR IFANSYAH, SKM, MS

NIP. 19860723 198903 1 012

Tembusan :

Inspektur Kab. Tapin

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/REVISI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan pelayanan terhadap anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	Nilai rata-rata Likert Pelayanan Timor a.C. Nilai Penilaian $N=10$ Penilaian, minimal 20. (Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran surat/judicial opinion/apresiasi/angket angket no.Kej/54/L.PA/2000)	80	Bagian Umum dan Kepegawaian	Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program
		Persentase jumlah angket Dewan yang dapat dijawab	$\frac{\text{Jumlah Keanggotaan yang dijawab}}{\text{Jumlah Keanggotaan}} \times 100\%$	100%	Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program	Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program
		Persentase jumlah surat keputus dari hasil tanggapan angket DPRD	$\frac{\text{Jumlah surat keputus yang di tanggapan}}{\text{Jumlah persentase surat keputus hasil tanggapan surat DPRD}} \times 100\%$	100%	Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program	Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program
		Persentase Penilaian Absensi surat Bupati keabsen yang diserahkan surat walikota	$\frac{\text{Jumlah surat keabsen surat yang diserahkan}}{\text{Jumlah surat keabsen surat yang diserahkan}} \times 100\%$	100%	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Bagian Hukum dan Perundang-undangan
		Persentase jumlah surat Dewan yang diserahkan surat walikota	$\frac{\text{Jumlah surat keputus Dewan yang diserahkan surat walikota}}{\text{Jumlah surat keputus Dewan yang diserahkan surat walikota}} \times 100\%$	100%	Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program	Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program
		Persentase jumlah surat keabsen surat walikota	$\frac{\text{Jumlah surat keabsen yang diserahkan}}{\text{Jumlah surat keabsen yang diserahkan}} \times 100\%$	100%	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap publik DPRD dengan DPRD	Persentase Pukul Piket DPRD Yang Masyarakat Sekeloa dengan DPRD	Jumlah pukul piket DPRD Yang diserahkan Sekeloa dengan DPRD $\frac{\text{Jumlah pukul piket yang diserahkan}}{\text{Jumlah pukul piket yang diserahkan}} \times 100\%$	100%	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Program

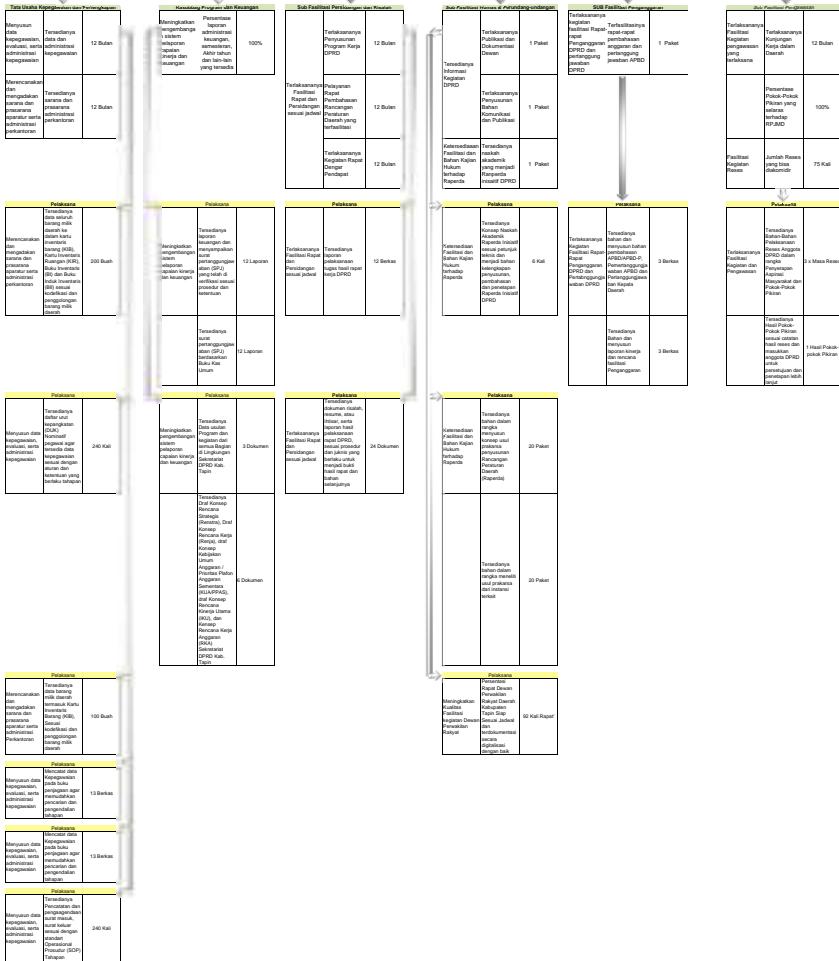
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TAPIN

Kategori: Kinerja Perencanaan		
Mengikuti	Melaksanakan	80
Mengikuti	Melaksanakan	100%
Mengikuti	Melaksanakan	100%
Mengikuti	Melaksanakan	80%
Mengikuti	Melaksanakan	100%
Mengikuti	Melaksanakan	65%
Mengikuti	Melaksanakan	100%

Kategori: Kinerja Pelaksanaan		
Mengikuti	Melaksanakan	80%
Mengikuti	Melaksanakan	80%
Mengikuti	Melaksanakan	80%
Mengikuti	Melaksanakan	80%
Mengikuti	Melaksanakan	80%

Kategori: Kinerja Pengawasan		
Mengikuti	Melaksanakan	80%
Mengikuti	Melaksanakan	80%
Mengikuti	Melaksanakan	80%

Kategori: Kinerja Evaluasi dan Pelaporan		
Mengikuti	Melaksanakan	80%
Mengikuti	Melaksanakan	80%



TAPPD

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

> program pengelolaan keuangan daerah

Indikator : penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu

>Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah

Indikator : Persentase PERDA dan PERBUB yang disahkan tepat waktu

> Koordinasi dan penyusunan KUA /PPAS

Indikator : Jumlah dokumen KUA dan PPAS & Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

PEMBAHASAN ANGGARAN DAERAH

SELURUH SKPD

BAPENDA

> Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

Indikator : Tercapainya pengelolaan pendapatan daerah

BAPELITBANG

>Penyusunan perencanaan dan pendanaan

Indikator : Presentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standart

> Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA

Indikator : Persentase program Renstra PD Mitra Bidang Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD (%), Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang Konsisten dengan program dan kegiatan Renstra PD Mitra Kerja bidang Ekonomi dan Infrastruktur

> perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator : Persentase dokumen rencana kerja disusun dan dilaporkan tepat waktu, pencapaian target kinerja Bappe litbang yang sesuai penetapan kinerja



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- > Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD
- indikator : Jumlah PERDA dan PERBUP APBD yang disusun sesuai ketentuan
- > Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD
- indikator : jumlah perda dan perbup APBD-P yang disusun sesuai ketentuan



PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)

BAGIAN HUKUM SETDA

- > Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah
- indikator : persentase rekomendasi hasil verifikasi rancangan produk hukum daerah (PERDA, PERBUP, KEPBUP) Yang di tindak lanjuti
- > Fasilitasi bantuan hukum
- indikator : persentase pelayanan bantuan hukum perkara yang dapat di selesaikan
- > Pendokumentasian & produk hukum & pengelolaan informasi hukum
- Indikator : jumlah produk daerah yang di publikasikan dan terintegrasi dengan JDIIH Pusat



SKPD

Yang Membidangi

